

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang dan Masalah Penelitian

##### 1. Peranan Partisipasi Anggota Dalam Koperasi

Prestasi yang dicapai oleh berbagai koperasi di Indonesia sangat bervariasi. Ada yang sukses, kurang sukses dan ada yang gagal. Keadaan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) yang relatif masih 'muda' dan sedang dalam pertumbuhan, maka yang sukses dalam usaha-usaha yang dikembangkannya juga masih terbatas. Fakta empirik menunjukkan bahwa: (a) partisipasi aktif para anggota secara kualitas dan kuantitas belum terwujud, (b) adanya personil pengurus yang berkualitas sangat terbatas, (c) penjabaran konsep ta'awun (saling membantu) masih terbatas dalam gotongroyong tradisional, (d) manajemen kopontren belum ditata secara profesional, dan (e) permodalan kopontren masih terbatas untuk pengembangan jenis usaha yang berskala kecil.

Keterbatasan dalam aspek-aspek di atas diduga karena belum terdapat keseimbangan dalam : (1) peningkatan kuantitas koperasi dengan kuantitas pengurus yang cekatan dan terampil, dan (2) pembinaan anggota pengurus dan anggota biasa. Data statistik mengenai perkembangan koperasi menunjukkan bahwa sejak Pelita I sampai dengan awal Pelita IV telah terdapat 26.179 koperasi (KUD dan Non KUD)

dengan 16.404.000 anggota. Yang telah mengikuti program pendidikan perkoperasian dari kalangan pengurus, badan pemeriksa, manager dan kader-kader koperasi 228.714 orang. Dalam jumlah tersebut terdapat 66.962 kader koperasi dan 5886 orang di antaranya adalah kader koperasi dari lingkungan masyarakat, termasuk dari pondok pesantren (Pidato Kenegaraan 1985, h. 687-694). Dari data tersebut ternyata bahwa program pendidikan dan latihan untuk para anggota, hanya berupa penyuluhan/penerangan saja. Berapa banyak anggota biasa yang dapat disentuh oleh program penyuluhan koperasi dan bagaimana dampaknya belum terungkap. Dan yang belum juga terungkap apakah usaha pendidikan perkoperasian untuk para anggota pengurus, BP, manager, kader dan lain-lain tidak hanya berhasil meningkatkan kuantitas saja tapi juga meningkatkan kualitas para peserta didik tersebut. Dengan kata lain latihan perkoperasian yang dikembangkan terbatas untuk kalangan anggota pengurus, sedangkan pendidikan atau latihan khusus untuk para anggota belum tergarap.

Rendahnya taraf partisipasi anggota dalam Koperasi pada umumnya dan dalam kopontren pada khususnya, boleh jadi merupakan konsekuensi logis dari belum tergarapnya pendidikan khusus untuk para anggota atau belum dapat diharapkan hasil dari penyuluhan/

penerangan koperasi yang telah dilancarkan. Sepanjang penelaahan referensi yang pernah dilakukan, maka masalah pembinaan dan pendidikan perkoperasian dalam lingkungan pondok pesantren masih merupakan "black box" atau belum pernah dikaji secara mendalam dengan pendekatan pendidikan. Atas dasar pertimbangan itulah studi penelitian ini dilaksanakan.

Dari sisi lain adanya partisipasi aktif para anggota koperasi, baik secara kuantitas apalagi secara kualitas (bersifat menyeluruh) adalah sendi utama dalam kehidupan koperasi. Dengan partisipasi aktif secara menyeluruh maka setiap anggota berperan serta dalam menentukan kebijaksanaan, memupuk modal, membina organisasi dan usaha, mengikuti pembinaan/ pendidikan, menerima pelayanan serta mengevaluasi/ mengawasi jalannya usaha dan/organisasi koperasi. Untuk kalangan siswa/santri, partisipasi aktif dalam berkoperasi mengandung makna pendidikan yang penting, yaitu meningkatkan persepsi dan pengalaman mengenai koperasi, sebagai media menjabarkan konsep ta'awun, memimpin dan dipimpin, memupuk persaudaraan/setiakawan (komitmen sosial), melatih diri dalam berdagang atau berwiraswasta dan lain-lain.

Mengingat arti pendidikan dari partisipasi berkoperasi seperti diuraikan di atas dan peranan

alumni pesantren sebagai tokoh nonformal dalam masyarakat, maka telah disepakati dan tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Koperasi (Menkop), Menteri Agama (Menag) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1985 tentang Pola Dasar mengenai Pembinaan dan Pengembangan koperasi di Lembaga Dakwah dan Lembaga Pendidikan Agama, termasuk Pondok Pesantren. Dengan adanya SKB tersebut lebih besar pula dorongan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pendidikan perkoperasian dalam lingkungan pondok pesantren dan masyarakat di sekitarnya.

Aspek lain dari keterbatasan koperasi yang telah disinggung terdahulu yang cukup menarik perhatian ialah keterbatasan dalam penjabaran konsep ta'awun. Telah dimaklumi bahwa gerakan koperasi yang sekarang dikembangkan berasal dari cooperative movement, dan sumbernya dari Barat. Konsep gerakan koperasi yaitu kerjasama, sebenarnya tidak asing dalam struktur budaya bangsa Indonesia dengan falsafah Pancasila dan mayoritas penduduk beragama Islam. Prinsip dasar koperasi sinkron dengan asas kekeluargaan/gotong royong, dan selaras juga dengan konsep ta'awun atau bertolong-tolongan atau saling membantu dalam ajaran agama, terutama dalam ajaran Islam. Atas adanya unsur budaya gotong royong atau konsep ta'awun

difusi gerakan koperasi dalam masyarakat luas pada umumnya dan dalam warga pondok pesantren pada khususnya semestinya tidak akan ada kesulitan. Dalam realisasinya difusi gerakan koperasi dalam kalangan pondok pesantren ternyata belum berkembang sebagaimana yang diharapkan. Fenomena itu juga menarik untuk ditelusuri.

Dalam penjabaran konsep ta'awun menjadi amal nyata, telah berkembang dalam konteks sosio-budaya keagamaan/kemasyarakatan dan terbatas sampai di situ. Kalaupun ada dalam konteks sosio-ekonomik, hanya dalam bentuk yang sederhana atau tradisional. Dengan adanya pembinaan organisasi koperasi di lingkungan pondok pesantren, maka merupakan usaha untuk menjabarkan konsep ta'awun itu bukan saja dalam konteks sosio-budaya, tapi juga dalam bentuk sosio-ekonomik yang tegak di atas sistem nilai agama yang menjadi anutan warga pondok pesantren. Dengan kata lain adanya gerakan koperasi dalam pondok pesantren merupakan terobosan terhadap keterbatasan dalam penjabaran konsep ta'awun atau gotong royong secara tradisional menjadi organisasi sosio-ekonomik yang ditata secara profesional yang berorientasi pada sistem nilai ajaran Islam. Sudah sampai sejauh mana upaya transformasi tersebut berlangsung, merupakan sisi lain



yang melatarbelakangi studi penelitian disertasi ini.

Peranan anggota koperasi cukup berarti dalam kehidupan koperasi, oleh karena itu telah ada beberapa studi terdahulu, antara lain yang dilakukan oleh Amin Azis, Harsono dan Syamsuri.

Studi Amin Azis mengenai partisipasi anggota dikaitkan dengan beberapa variabel, terutama dengan produk koperasi. Dalam penelitian tersebut pendekatan yang digunakan dari segi ekonomi dan sosial. Masalah rendahnya partisipasi anggota tidak disoroti lebih jauh, terutama dari segi pendidikan.

Penelitian disertasi Harsono mengkaji kaitan partisipasi warga koperasi (pengurus dan anggota) dengan taraf keberhasilan koperasi, pendidikan warga koperasi, faktor lingkungan dan beberapa variabel lainnya. Dalam pengkajian tersebut memang ditonjolkan mengenai materi pendidikan perkoperasian walaupun secara global. Pendekatan yang digunakan dalam studi penelitian tersebut dari segi ekonomi, sosial dan pendidikan.

Pembahasan mengenai partisipasi anggota dalam berkoperasi juga diungkap dalam penelitian disertasi Syamsuri yang dikaitkan dengan daya hidup koperasi dan kesejahteraan anggota. Dalam studi itu ditelusuri juga mengenai persepsi dan latar belakang pendidikan

anggota koperasi walaupun bukan merupakan fokus sentral dari studi tersebut. Sepintas lalu pendekatan yang digunakan dalam studi itu dari segi sosial-ekonomi dan pendidikan.

Dari studi penelitian yang telah diuraikan di atas belum terungkap lebih jauh mengenai latar belakang yang mendorong tinggi atau rendahnya taraf partisipasi anggota dan bagaimana kaitannya dengan pengaruh pendidikan perkoperasian, penampilan pengurus dan sistem nilai yang diadopsi suatu kelompok masyarakat tertentu. Hal itu merupakan celah yang dapat diteliti oleh studi lain.

Studi penelitian ini memilih celah tersebut di atas menjadi bahan pengkajian utama dan pendekatan yang digunakan ialah dari segi pendidikan, terutama pendidikan luar sekolah, sosial-ekonomi dan agama. Dengan kata lain partisipasi anggota dalam berkoperasi diduga berkaitan dengan variabel-variabel:

- (a) psikis anggota sebagai pengaruh dari pendidikan dan komunikasi mengenai koperasi terutama: keterbukaan menerima ide koperasi, komitmen sosial dan persepsi mengenai koperasi.
- (b) penampilan pengurus kopontren terutama kredibilitas dan gaya kepemimpinan, dan

- (c) salah satu unsur dari sistem nilai yaitu sistem penghargaan yang berkembang dalam kultur pondok pesantren.

Sudah tentu masih ada variabel-variabel lain yang mendorong terwujudnya partisipasi anggota dan hal itu akan merupakan obyek studi lain pula.

Dalam studi penelitian ini taraf keberhasilan kopontren ditelusuri juga, sekedar untuk menyelami sampai sejauh mana kemajuan yang dicapainya. Dalam mengukur taraf keberhasilan tersebut, bukan hanya dari aspek organisasi dan usaha saja, tapi juga mengenai aspek keanggotaan. Masalah latar belakang pendidikan formal dan pendidikan perkoperasian mendapat perhatian khusus dalam menelusuri aspek keanggotaan. Oleh karena data mengenai kemajuan yang dicapai oleh kopontren tidak lengkap dan heterogen penataannya serta belum terdapat alat ukur yang dapat diandalkan maka taraf keberhasilan kopontren tidak diperlakukan sebagai salah satu variabel dalam penelitian ini.



## 2. Pembinaan Koperasi Dalam Sistem Pendidikan Nasional.

Inovasi perkoperasian mulai diintroduksi di Indonesia sejak tahun 1889 di Purwokerto (Lumonan, 1979, h. 6). Sementara itu pembinaan koperasi melalui jalur pendidikan luar sekolah berupa kursus-kursus kader koperasi dimulai sejak tahun 1950 (Santoso dkk, 1973, h. 23). Akan tetapi proses pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi yang demokratis dan berkeadilan itu, belum memperlihatkan eksistensinya sebagaimana yang diharapkan. Kecenderungan itu terungkap dari penjelasan Mubyarto (Kompas, Mei, 1981), bahwa peranan koperasi dalam pengumpulan dana hanya sebesar 0,4% saja dalam ekonomi nasional; bagian riil dari koperasi sampai tahun 1979 pada Produk Domestik Bruto masih sekitar 2%, sementara dari perusahaan negara 12%, dan dari swasta 86%. Memang ada peningkatan secara nominal dari jumlah koperasi melalui pembinaan Koperasi Unit Desa (KUD) yang didukung oleh pemerintah, Jumlah anggota KUD di seluruh Indonesia pada 1978 sebanyak 7½ juta orang yang kemudian meningkat menjadi 12 juta pada tahun 1982. Dan sumbangan koperasi kepada GNP nasional sebesar 4% (Kompas, Juni, 1983). Berbeda dengan kecenderungan tersebut, di beberapa negara tertentu koperasi itu justru dapat hidup baik dan subur seperti di Denmark, Swedia, Amerika Serikat, Inggris, Jerman Barat, Australia dan Perancis (Dawam R, 1983; Swasono, ed, 1983, h. 197). Sedangkan di negara-negara 'Dunia Ketiga' seperti di Afrika, Amerika Latin dan Asia termasuk di

Indonesia, citra koperasi di mata rakyat miskin masih merupakan wadah usaha yang dianggap riskan bahkan seringkali mengecewakan. Padahal cita-cita koperasi di Indonesia ialah memelihara kepentingan bersama, menyelenggarakan keperluan hidup bersama (Hatta, 1971, h. 5). Koperasi yang sukses bukan hanya tampak dari produknya yang meningkat dan anggota-anggotanya yang bertambah, tapi yang penting apakah seluruh warganya telah mengecap kesejahteraan (lahir/batin) yang diperoleh dari koperasinya. Tidak keliru pendapat Sumitro (1983) bahwa secara maksimal koperasi harus ditujukan untuk memperbaiki kualitas hidup anggota-anggotanya (Swasono, ed, 1983, h. 249). Penegasan tokoh ekonomi Indonesia itu disebabkan karena banyak kasus yang menunjukkan adanya fenomena yang tidak selaras dengan tujuan tersebut tadi.

Kecenderungan koperasi di Indonesia yang belum tumbuh subur itu dapat dikaitkan dengan beberapa faktor seperti (1) kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang belum memadai dalam mengelola organisasi secara baik; (2) kualitas para anggota pengurus koperasi masih ada yang belum mencerminkan kejujuran sehingga merusak citra koperasi dan akibatnya tumbuhlah 'alergi' terhadap koperasi, dan (3) taraf partisipasi dari seluruh warga koperasi yang masih rendah. Faktor-faktor kelemahan koperasi di Indonesia masih banyak bersumber dari kualitas warga koperasi yang rendah.

Dengan demikian jelaslah, bahwa kualitas para anggota koperasi merupakan akar dari keberhasilan koperasi. Untuk meningkatkan kualitas anggota, pendidikan dipandang dapat memberikan kontribusi yang berarti. Oleh karena itu, masuk akal penegasan Teko Sumodiwiryo yang mengikuti alur berpikir Rochdale bahwa, "Berhasil tidaknya koperasi terutama tergantung kepada kualitas para anggota. Oleh karena itu maka soal pendidikan merupakan faktor yang penting dalam gerakan koperasi (Swasono, ed, 1983, h. 32). Dari gerakan koperasi yang dipelopori Rochdale pada 1852 telah ditetapkan bahwa 2½% dari keuntungan disediakan untuk pendidikan.

Jalan yang ditempuh dalam pembinaan koperasi melalui pendidikan formal dan pendidikan luar sekolah. Kelompok sasarannya dalam pendidikan formal dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi. Sedangkan kelompok sasaran melalui pendidikan luar sekolah (PLS) adalah warga koperasi apa saja dan warga masyarakat luas mulai dari anak-anak sampai orang tua.

Untuk memasyarakatkan koperasi, maka pengetahuan koperasi telah diajarkan disekolah formal, dan telah ada sejumlah buku teks pelajaran koperasi untuk berbagai tingkat pendidikan. Kesungguhan pemerintah makin meningkat dalam usaha-usaha untuk pembinaan koperasi melalui pendidikan formal dan PLS, dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SK B) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Koperasi No. 0108/P/1984  
51/KPTS/III/1984 tanggal 22 Maret 1984 yang mengatur

Pola Dasar Pembinaan Pendidikan Perkoperasian dari jenjang ~~Taman~~ Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi. Dalam SKB itu disebutkan bahwa pendidikan Perkoperasian merupakan salah satu sub-sistem pendidikan nasional yang diarahkan untuk membina peserta didik agar:

1. Memiliki kesadaran berkoperasi yang mendalam sehingga dari dalam hati nurani peserta didik terpantul jiwa dan semangat berkoperasi,
2. Memiliki pengetahuan perkoperasian, baik secara ideologis, teoritis dan praktis,
3. Memiliki kemampuan berkoperasi yang baik sehingga mereka mau berpartisipasi aktif dalam kehidupan dan dunia perkoperasian, dan
4. Memiliki sikap dan tingkah laku yang dilandasi oleh nilai-nilai dan akhlak koperasi.

( Kurikulum Pendidikan Perkoperasian, 1986, h.1 )

Sebagai tindak lanjut dari SKB di atas telah disusun Kurikulum dan Garis-garis Besar Program Pengajaran Perkoperasian untuk pendidikan formal yang dilakukan oleh Pusat Latihan dan Pendidikan Koperasi (PUSLATPENKOP) yang dibantu oleh tenaga ahli dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Upaya pendidikan koperasi melalui jalur pendidikan luar sekolah (PLS) misalnya dengan berbagai bentuk latihan atau penataran telah pula digarap oleh Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pendidikan dan Latihan yang dikembangkan pemerintah melalui Puslatpenkop di Jakarta dan Balatkop di ibukota propinsi telah digiatkan sejak Pelita I sampai dengan Pelita IV sekarang ini. Kelompok sasarannya adalah para personil dari gerakan koperasi dari lingkungan

KUD dan Non KUD yang terdiri dari para pengurus, badan pemeriksa, manajer dan karyawan koperasi, serta para kader koperasi yang seluruhnya berjumlah 228.714 orang ( Pidato Kenegaraan Presiden RI, 1985, h.692-693 ). Sejak Pelita I sampai sekarang pembinaan perkoperasian baik dari segi lembaga/organisasi dan usaha/permodalan maupun pembinaan sumber daya manusianya telah dikembangkan.

Dari kesungguhan pihak pemerintan dan lembaga lainnya dalam membina perkoperasian terutama KUD memang terlihat adanya peningkatan kuantitas dalam perkoperasian di Indonesia. Bagaimana tentang kualitasnya dan sampai berapa jauh produktivitas personil-personil yang telah dilatih terutama para kader koperasi mengembangkan missinya, belum banyak terungkap. Hal itu merupakan dorongan yang paling utama melatarbelangi studi penelitian ini.

Pembinaan warga koperasi melalui jalur PLS peluangnya lebih besar daripada pendidikan formal, karena keterbatasan daya tampung lembaga pendidikan formal pada semua tingkatannya. Oleh karena itu pendidikan koperasi melalui jalur pendidikan luar sekolah tidak hanya membina para personil dari gerakan koperasi, tapi juga melayani mereka yang tak dapat dilayani pada jalur pendidikan formal.

Pendidikan perkoperasian untuk para warga koperasi telah banyak dikembangkan bukan hanya untuk KUD dan juga untuk warga Non KUD. Belajar koperasi dengan terjun langsung



sebagai warga koperasi telah banyak dikembangkan di kalangan mahasiswa dan pelajar, atau santri serta masyarakat di Indonesia pada akhir-akhir ini. Mengenai apa dan bagaimana usaha dalam pendidikan perkoperasian dalam masyarakat pada umumnya dan dalam lingkungan pondok pesantren khususnya, merupakan masalah-masalah yang akan ditelusuri dalam studi ini.

### 3. Kehadiran Koperasi Dalam Ekonomi Masyarakat Pedesaan

Dalam rangka mewujudkan cita-cita mengenai kemajuan, kesejahteraan dan keadilan sosial serta menerangi kemiskinan dan keterbelakangan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa, maka koperasi sebagai wadah ekonomi dapat memainkan peranan penting. Koperasi telah tumbuh di lingkungan pegawai negeri, militer, swasta misalnya pedagang kecil, supir, petani, buruh dan sebagainya, baik di perkotaan maupun pedesaan. Dalam pengembangan koperasi itu, pemerintah Indonesia merestui dua pola perkoperasian, yaitu pola Koperasi Umum dan Koperasi Unit Desa (KUD). Pola KUD telah disebarluaskan ke seluruh pedesaan di Indonesia dan dikaitkan dalam pembangunan pedesaan, khususnya sebagai sarana penunjang program intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pertanian (Ibnu Sudjono, 1983; Swasono, ed, 1983, h. 49-51). Dengan kata lain pengembangan koperasi di mana saja di Indonesia bisa berorientasi kepada kedua pola tersebut. Kehadiran Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) di pedesaan pada beberapa propinsi di Indonesia telah merupakan kenyataan dan

pengembangannya seperti koperasi Non-KUD lainnya.

Dalam operasionalnya, Kopontren bukan hanya berkiprah dalam perkampungan pondok pesantren, tetapi juga di kalangan warga masyarakat dekat pondok pesantren dan yang jauh dari pesantren. Tidak mengherankan jika terjalin kerjasama atau sebaliknya (friksi) antara KUD dan Kopontren. Dalam kasus di Kopontren "Hidmat Suryalaya" di Tasikmalaya, "Darul Ulum" di Jombang dan "Gontor" di Ponorogo, warga masyarakat tidak sedikit jumlahnya menjadi anggota Kopontren, atau berhubungan dengan Kopontren.

Pengembangan koperasi di pedesaan menjadi tumpuan perhatian dan harapan untuk memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat. Hal itu relevan dengan keadaan demografik di Indonesia yaitu hanya sebagian kecil rakyat yang tinggal di perkotaan, dan sekitar 80% berdomisili di pedesaan dengan taraf hidup yang masih bersahaja.

Dalam pembinaan ekonomi masyarakat di pedesaan, penumbuhan dan pengembangan koperasi telah dilaksanakan, terutama pembinaan dan pengembangan KUD. Pengalaman menunjukkan bahwa pembinaan koperasi dalam lingkungan masyarakat yang telah mengesap tingkat pendidikan yang lebih baik misalnya dalam lingkungan pegawai, mahasiswa atau pelajar hal itu tidaklah mudah. Lebih-lebih di kalangan warga desa yang masih terikat oleh kebiasaan dan sikap yang kurang relevan dengan gerakan koperasi. Banyak di antara mereka itu yang tingkat pendidikannya rendah

bahkan yang tidak berpendidikan atau mengidap 'tiga buta' yakni: buta aksara/angka Latin - Arab, Bahasa Indonesia dan pengetahuan dasar. Yang paling sulit diatasi adalah gejala kemiskinan sebagai akibat faktor kurangnya pendidikan, hambatan struktural dan musibah alamiah yang pernah terjadi.

Pembinaan koperasi tidaklah sekedar menyusun komposisi dan personalia pengurus dengan atau tanpa melalui musyawarah, lalu mendirikan kantor atau gudang dan memasang papan nama untuk sekedar diperlihatkan bahwa telah ada koperasi tertentu. Dengan kata lain usaha yang lebih mengutamakan pembinaan fisik koperasi lebih banyak dijumpai, sedangkan pemikiran dan usaha-usaha pembinaan yang mendasar yang bersifat nonfisik seperti bagaimana mendorong dan meningkatkan partisipasi para anggota untuk berkoperasi dengan baik, agak terlalaikan.

Ada juga koperasi yang berjalan secara musiman atau kegiatannya insidental. Keadaan seperti itu pernah dijumpai di beberapa kopontren yang diteliti. Kasus tersebut terjadi, diduga karena tidak disertai pembinaan terhadap aspek sumber daya manusianya, baik di kalangan pengurus maupun para anggotanya.

Ada beberapa Kopontren yang mengalami nasib seperti itu. Para kiyai pimpinan pondok pada umumnya menyatakan bahwa di pondok pesantrennya memang telah ada yang pernah mengikuti penataran koperasi, namun mereka yang pernah

mengikuti kesempatan itu belum dapat juga menggerakkan mobilitas koperasinya. Di samping itu ada pula beberapa Kopontren yang relatif berhasil, dan perlu ditiru oleh Kopontren lainnya. Dari Kopontren yang relatif sukses itu ternyata usaha koperasinya dikelola oleh mereka yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan dedikasi untuk membina koperasi di pedesaan. Dengan kata lain koperasi itu akan hidup dan berkembang apabila didukung oleh manusia-manusia yang terdidik yang dijiwai oleh kejujuran, loyalitas, dedikasi serta kreativitas untuk mengembangkan koperasinya. Insan koperasi yang berkualitas tidak terbentuk dengan sendirinya dengan mendadak, tapi melalui pembinaan pendidikan yang berlangsung lama dan teratur. Menteri Tenaga Kerja Sudomo mensitir kembali pendapat Hatta, bahwa koperasi tidak saja merupakan wadah ekonomi, tapi merupakan sarana pendidikan bagi masyarakat Indonesia (Swasono, ed., 1983, h. 40).

Mengingat demikian pentingnya peranan pendidikan perkoperasian untuk menunjang gerakan koperasi Indonesia, maka sejak tahun 1952 koperasi telah dimasukkan sebagai mata pelajaran dalam lembaga pendidikan formal sejak dari SD sampai PT ( Santoso, dkk, 1973 ).

Di pondok pesantren yang pada umumnya berlokasi di pedesaan, koperasi tumbuh sebagai elemen baru yang menunjang pemenuhan keperluan hidup sehari-hari untuk warga pondok pesantren maupun keperluan belajar para

santri. Untuk warga pondok pesantren dan sekitarnya Kopontren berperan juga sebagai sarana pendidikan yaitu wahana bagi latihan kepemimpinan para pengurus dan latihan mengembangkan usaha bagi para pelaksana atau manager. Sedangkan bagi para anggota, Kopontren adalah tempat belajar berkoperasi secara langsung dari praktek-praktek koperasi. Kopontren itu dapat juga merangsang dan menyentuh ekonomi lapisan masyarakat pedesaan. Lebih konkrit lagi, melalui Kopontren akan dapat diatasi beberapa masalah seperti memupukkan modal usaha untuk keperluan investasi bagi mereka yang memiliki usaha-usaha tertentu, menciptakan kepastian pasar untuk masyarakat, baik dalam menjual hasil produksinya misalnya sayur-mayur, beras, tahu-tempe dan lain-lain, maupun untuk membeli hasil produksi Kopontren misalnya hasil peternakan ikan tambak, ayam potong dan susu sapi. Pendek kata kehadiran koperasi pondok pesantren--tanpa membanding besar dan kecilnya--koperasi yang ada di dalamnya--telah merangsang dan mendorong warga masyarakat di sekitarnya untuk aktif berperan, apakah sebagai anggota atau tidak. Kopontren telah membuka kesempatan kerja secara langsung baik sebagai karyawan Kopontren atau maupun bekerja sebagai usaha sendiri dan hasil produksinya dipasarkan ke Kopontren. Dengan kata lain melalui kegiatan Kopontren terdapat kesempatan berusaha untuk mendapatkan insentif material dan nonmaterial yang sangat penting dalam mengatasi kemiskinan.



#### 4. Pendekatan Pendidikan Dalam Pembinaan Koperasi

Pendidikan koperasi dalam masyarakat luas telah lama dikembangkan oleh pemerintah Indonesia melalui program-program pendidikan luar sekolah dengan materi perkoperasian seperti yang dilakukan oleh Departemen Koperasi dan juga oleh lembaga-lembaga swasta yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kegiatan tersebut dilaksanakan pada pusat-pusat latihan atau di dalam pondok pesantren tertentu.

Di samping pembinaan dalam bentuk pendidikan, maka informasi gerakan koperasi dikomunikasikan kepada masyarakat melalui jalur media massa misalnya dengan media cetak seperti koran, majalah, selebaran; dengan media elektronik antara lain lewat siaran TV dan Radio RRI atau non-RRI. Cara lain untuk melakukan difusi perkoperasian juga ditempuh melalui media tatap muka seperti dengan ceramah khusus mengenai koperasi atau dibakukan dalam dakwah keagamaan dengan tema dakwah pembangunan yang di dalamnya terselip pengenalan dan motivasi perkoperasian.

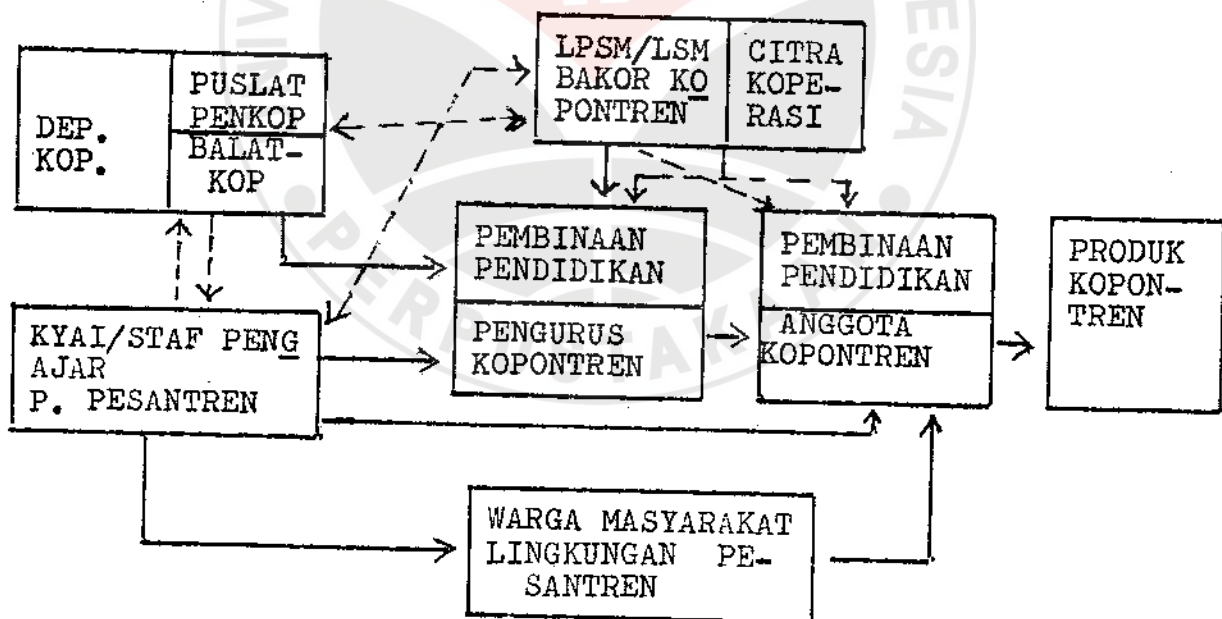
Pembinaan perkoperasian dengan pendekatan pendidikan luar sekolah dan komunikasi, sukar dipisahkan secara lugas. Dan yang penting difusi perkoperasian sebagai gagasan dan gerakan telah diluncurkan kepada warga masyarakat apakah dalam program khusus perkoperasian atau dalam program yang tergabung dalam Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP).

Pada masa Orde Baru pendidikan dan latihan kope-rasi yang telah dikembangkan oleh Departemen Koperasi melalui Pusat Latihan dan Pendidikan Koperasi (PUSLAT-PENKOP) di Jakarta dan di Balai Latihan Koperasi (BALAT-KOP) yang ada di seluruh propinsi di Indonesia untuk para pengurus Koperasi Non-KUD dan KUD telah cukup banyak. Pendidikan keterampilan untuk berbagai fungsi pengurus misalnya dalam manajemen, pemasaran, pembukuan-auditing, badan pemeriksa, manager dan lain-lain. Khusus untuk membina para pegawai Departemen Koperasi, misalnya untuk para calon pegawai, promosi kenaikan pangkat, dan kete-rampilan khusus disediakan pula Pusat Pendidikan dan Latihan atau PUSDIKLAT.

Pendidikan dan latihan koperasi yang diselenggara-kan oleh LSM telah berlangsung cukup lama. Ada 300 anggota LSM yang telah mengembangkan berbagai program pendidikan luar sekolah termasuk di dalamnya pendidikan dan latihan koperasi. Di antara anggota LSM yang giat melaksanakan kegiatan latihan perkoperasian antara lain WIRA KOPERASI, Credit Union, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerang-an Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Yayasan Desa Bahagia (YDB) dan Badan Koordinasi Koperasi Pondok Pesantren (Bakor Kopontren). Bakor Kopontren yang hanya ada di Jawa Barat saja yang merupakan lembaga swasta yang ditunjang oleh fasilitas dan dana dari pemerintah daerah Jawa Barat, telah melatih 208 personel pengurus Kopontren sejak 1980

yang lalu. Dalam operasionalnya pelaksanaan Latihan itu bekerjasama dengan para petugas dari Kantor Wilayah Departemen Agama dan Departemen Koperasi Jawa Barat. Partisipasi Balatkop Jawa Barat dalam pendidikan dan latihan Kopontren hanya untuk 30 personil saja sejak tahun 1980 sampai 1985 yang lalu. LP3ES dan YDB juga banyak menggarap pendidikan dan latihan perkoperasian di dalam pondok-pondok pesantren tertentu sedangkan Bakor Kopontren dan Balatkop melakukan kegiatan latihannya dipusatkan di Bandung.

Untuk mendapat gambaran lebih jelas mengenai mekanisme pembinaan Kopontren pada umumnya, dan Kopontren di Jawa Barat pada khususnya, dapat diperhatikan gambar di bawah ini.



Gambar 1. Mekanisme Pembinaan Kopontren di Jawa Barat

Sampai berapa jauh dampak pendidikan atau latihan koperasi yang telah dilakukan terhadap produktivitas kerja para pengurus Kopontren, dan berapa kuat dampak bimbingan perkoperasian oleh pengurus Kopontren atau pimpinan pesantren seperti telah dilakukan di atas terhadap perkembangan Kopontren, sepanjang yang diketahui belum pernah terungkap dengan jelas.

Di antara beberapa studi mengenai hasil latihan koperasi yang pernah dilakukan oleh 'Akademi Koperasi 12 Juli Bandung', bekerjasama dengan Direktur Jenderal Koperasi pada tahun 1981 terhadap hasil latihan dan penataran koperasi untuk pengurus dan manager KUD dan Koperasi non-KUD pada garis besarnya bahwa melalui latihan koperasi memang telah meningkatkan pengetahuan para peserta dan akan bermanfaat jika diterapkan. Namun demikian ada kecenderungan bahwa materi yang disajikan, tidak ada kaitan dan tidak relevan dengan koperasi yang digeluti oleh para peserta latihan koperasi (AKOP 12 Juli, 1981).

Hasil studi lain yang dilakukan oleh peneliti International Labour Organization (ILO) di negara-negara Afrika ternyata menunjukkan bahwa waktu yang digunakan tidak cukup sehingga materi yang diterima para peserta sangat minimal. Hal lain yang dipandang kritis ialah banyaknya 'drop out' dari para peserta latihan perkoperasian. Hal ini disebabkan karena tidak jelasnya masa depan para peserta setelah selesai latihan tersebut. Gejala seperti itu diduga ada juga dalam

kalangan peserta latihan koperasi di Indonesia.

Masalah-masalah di pedesaan perlu diatasi dengan kegiatan-kegiatan kolektif atau melalui organisasi sosial. Untuk terlibat dalam suatu organisasi di pedesaan memang terdapat berbagai hambatan, di antaranya berkaitan pada persepsi masyarakat terhadap organisasi dan bentuk-bentuk yang majemuk dari organisasi yang sukar dimengerti oleh kebanyakan warga desa. Warga masyarakat desa yang pada umumnya bersifat tradisional melihat organisasi hanya dalam konteks keluarga atau ikatan yang bersifat pribadi, atau yang bersifat kecil-kecilan dan loyalitasnya bersifat primordial (Deliar Noer, 1983, h. 6). Sedangkan organisasi yang dikembangkan umumnya berhulu dari organisasi yang berasal dari masyarakat Barat yang sifatnya modern. Sudah tentu karakteristiknya berbeda dengan persepsi mengenai organisasi dari para warga desa pada umumnya. Dengan pendekatan pendidikan, dapatkah dilakukan transformasi dari berorganisasi secara tradisional menjadi berorganisasi secara modern dan rasional, hal itu merupakan masalah yang belum jelas.

Dari pengamatan sepintas ada semacam keengganan di kalangan warga desa untuk menjadi anggota dari salah satu organisasi massa apalagi organisasi politik walaupun kecenderungan mereka untuk berpartisipasi dalam organisasi masih ada. Hal ini sangat jelas sekali setelah banyak tragedi sebagai akibat berorganisasi yang berkaitan



dengan organisasi atau partai politik yang dilarang atau dibubarkan. Dengan kata lain terdapat 'phobia' atau 'trauma' terhadap organisasi apapun barangkali termasuk organisasi koperasi. Hal itu sangat dirasakan setelah peristiwa 'G-30-S'. Fenomena itu terungkap dari penelitian Tjondro-negoro (1982) dalam penelitian di pedesaan daerah Klaten Jawa Tengah dan Cibadak Sukabumi Jawa Barat. Organisasi selalu dikaitkan dengan partai-partai politik tertentu oleh kebanyakan warga desa; oleh karena itu organisasi terletak di luar jangkauan perhatian mereka (Koentjaraningrat, ed, 1982, h. 217). Apakah kecenderungan seperti itu juga terdapat dalam lingkungan pondok pesantren, permasalahannya belum jelas.

Para peneliti seperti Geertz(1959), Jay (1969), Dewey (1962) dan Lyon (1970) berpendapat bahwa masyarakat desa di Jawa tidak mempunyai pola organisasi yang jelas, dan tidak mempunyai bentuk-bentuk organisasi yang efektif, terkecuali Pamong Desa. Oleh karena organisasi pamong desa yang dianggap jelas dan realistis maka jalur itulah yang selalu dimanfaatkan untuk berbagai keperluan termasuk dalam perencanaan pembangunan. Pola berpikir itulah yang tetap menjadi bahan orientasi dalam perencanaan pembangunan desa sampai jaman sekarang ini (Koentjaraningrat, ed, 1982, h. 215 dan 218). Di samping itu ikatan yang akrab di kalangan warga desa hanya ada pada tingkat dukuh, rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) saja, organisasi yang

bersifat nepotisme mulai pudar. Namun jalinan itu tetap akrab jika dilandasi oleh lembaga-lembaga terutama yang bersifat keagamaan, dan pendidikan; yang bersifat adat istiadat tidak demikian halnya.

Dari penelitian (disertasi) Sutaryat (1984) terungkap pula bahwa organisasi di kalangan para petani (warga kelompok tani) juga terdiri dari para petani dari lingkungan desa, yaitu kelompok yang tertutup atau terbuka yang secara implisit adalah berupa organisasi dalam lingkungan Dukuh dan RW nya. Sementara itu, organisasi yang disebut 'Mitra Cai' yaitu persatuan pemakai air pada irigasi Jatiluhur yang diteliti oleh Sudardja (1981), merupakan organisasi yang dikelola secara terpusat dan di dalamnya terdapat kerjasama fungsional dalam rangka partisipasi langsung masyarakat. Dalam organisasi itu tidak hanya untuk warga dalam lingkungan Dukuh dan RW tapi meliputi beberapa kecamatan (Prisma, 9, 1984, h. 75). Organisasi Mitra Cai itu dapat mengikat warga begitu luas karena menyangkut (1) kebutuhan pokok yaitu masalah air untuk keperluan mata pencaharian (bertani), (2) adanya intervensi atau campur tangan pamong desa dan instansi yang lebih tinggi, dan (3) secara implisit adanya pendidikan atau bimbingan ke arah itu.

Oleh karena Kopontren tidak hanya mengikat warganya di kalangan santri beserta para guru, pegawai, keluarga guru di dalam perkampungan pesantren, tapi juga warga

masyarakat desa, sampai sejauh mana ikatan yang akrab (kohesif) di kalangan warga Kopontren itu? Apakah hanya terjadi pada warga masyarakat yang satu RW atau Desa saja, atau dapat menjangkau daerah lebih luas dari itu. Sekiranya lebih luas, apakah ada kaitannya dengan proses pendidikan perkoperasian yang dijalankan dengan kegiatan majelis taklim itu mampu menggerakkan partisipasi berkoperasi para warganya, hal itu belum terungkap lebih jelas.

Fakta menunjukkan bahwa koperasi telah tumbuh dan berkembang di dalam atau di sekitar pondok pesantren. Hal itu berarti difusi gerakan koperasi telah masuk ke dalam tubuh pondok pesantren dan masyarakat di sekitarnya. Terjadinya adopsi ide dan gerakan koperasi dalam pondok pesantren khallafi (yang menerapkan sistem madrasi), pesantren modern atau pesantren khusus seperti Darul Fallah atau Pabelan tidak menimbulkan masalah. Dan penyelenggaraan koperasi dalam pondok pesantren tradisional dan tertutup dengan ide-ide dari luar, merupakan suatu inovasi. Dikatakan demikian karena pada pondok pesantren yang disebut terakhir ini sebagai lembaga keagamaan dan pendidikan, kurang begitu peduli terhadap bagaimana pembinaan bidang ekonomi dan bagaimana penataannya, karena orientasinya hanya terfokus untuk mendalami ilmu-ilmu agama atau hal-hal yang bersifat sakral saja. Masuknya ilmu-ilmu yang dianggap mengurangi bobot penguasaan ilmu-ilmu yang menunjang terwujudnya cita-cita pondok pesantren yaitu mencetak calon

ulama atau kiyai yang faqih, masih merupakan diskusi yang hangat dalam lingkungan tokoh-tokoh dan para pemikir pendidikan pondok pesantren. Ada sementara pendapat dalam kalangan itu bahwa kehadiran koperasi dalam pondok pesantren akan mengganggu tercapainya tujuan utama pondok pesantren. Hal itu bukan berarti bahwa tidak ada kiyai atau santri yang terjun dalam perusahaan dagang. Di antara mereka ada yang giat dalam sektor ekonomi secara individual. (Geertz, 1959, h. 175; Saifuddin, 1974, h. 38). Melalui pengamatan sepintas pada pondok-pondok pesantren modern dan tradisional tidak sedikit para guru atau kiyai muda yang membuka usaha dalam perkampungan pesantren misalnya berupa warung atau dapur umum milik pribadi. Dengan adanya Kopontren dan pendidikan atau bimbingan perkoperasian dapatkah semangat berdagang secara individu ditransformasi menjadi semangat dagang yang kooperatif? Di lain pihak adakah di antara pondok pesantren tradisional itu yang sukses dalam mengelola koperasinya, ini merupakan masalah yang belum terungkap dengan jelas.

Proses pendidikan koperasi untuk personil pengurus kopontren telah lama dikembangkan. Beberapa bentuk penyebaran informasi perkoperasian antara lain dengan diskusi panel di beberapa Kopontren pernah dilakukan. Banyak di antara Kopontren yang mengirimkan beberapa dari pengurusnya untuk mengikuti latihan atau penataran koperasi itu baik yang diselenggarakan di luar maupun di dalam pondok

pesantren. Sebagian besar para peserta tersebut dilatih oleh Bakor Kopontren dan yang lainnya dilatih oleh anggota LSM lainnya. Sebagian kecil dilatih oleh petugas dari Departemen Koperasi melalui PUSLATPENKOP atau BALATKOP. Sejak tahun 1980 sampai 1985 Bakor Kopontren Jawa Barat telah menatar para peserta dari kalangan pengurus kopontren dan melakukan evaluasi terhadap 85 dari seluruh Kopontren yang terdaftar pada lembaga itu. Dari fakta itu ternyata bahwa pendidikan perkoperasian lebih banyak ditangani oleh lembaga swasta daripada oleh kalangan pembina formal perkoperasian. Di antara lembaga-lembaga itu terdapat kerjasama terutama dari Bakor Kopontren dengan lembaga formal, namun bagaimana kerjasama sesama anggota LSM dengan instansi resmi, belum jelas. Cukup menarik untuk ditelusuri apakah pendidikan perkoperasian yang telah dilancarkan itu relevan dengan tujuan atau fungsi Kopontren, atau apakah materi yang dilatihkan itu memang sesuai dengan kebutuhan (needs) kopontren? Apakah pendekatan yang dipergunakan LSM dan dari lembaga formal koperasi itu sejalan atau sebaliknya, dan juga menarik untuk ditelusuri apakah latihan-latihan yang telah dikembangkan Puslatpenkop/Balatkop Departemen Koperasi, kegiatan latihan-latihan oleh LSM dan yang diselenggarakan di pondok pesantren itu dampaknya serupa? Yang menjadi masalah utama apakah dengan proses pendidikan koperasi itu dapat ditingkatkan komitmen sosial, persepsi atau pengetahuan dan kesadaran berkoperasi yang



pada gilirannya mendorong timbulnya perilaku berkoperasi atau partisipasi dalam berkoperasi. Masalah yang telah dikemukakan tersebut belum juga terungkap.

Kopontren telah tampil menjadi subsistem dalam mekanisme proses pendidikan pondok pesantren yang merupakan suatu sistem. Oleh karena itu dalam pengelolaannya tidak lepas atau terlalu jauh dengan corak kepemimpinan yang telah mapan dalam pesantren masing-masing. Tinggi atau rendahnya produk koperasi pondok pesantren tidak terlepas pula dengan cara-cara pengelolaan pondok pesantren pada umumnya dan pengelolaan pengurus Kopontren pada khususnya. Dari aspek kepemimpinan yang dapat menggerakkan Kopontren sebagai organisasi masalah kredibilitas dan gaya kepemimpinan pengurus diduga besar perannya dalam mendorong partisipasi para anggota kopontren. Sampai berapa jauh dampak kredibilitas dan gaya kepemimpinan pengurus Kopontren dalam memacu partisipasi para anggota dalam kegiatan koperasinya belum jelas dan menarik juga untuk ditelusuri.

Proses edukasi, difusi dan kepemimpinan dalam Kopontren yang dapat menjangkau para anggotanya dalam lingkungan intern dan ekstern perkampungan pondok pesantren melalui penanganan yang sebagian di antaranya tak dapat dilepaskan dengan kegiatan pendidikan yang bersifat keagamaan. Pendidikan dan keagamaan masih dapat mengikat seluruh warga pesantren secara akrab sehingga

terbentuk komitmen sosial yang kuat. Melalui kepemimpinan kiyai dan para pembantunya diberikan arah bahwa gerakan koperasi yang dilandasi nilai-nilai agama yang diambil dari ajaran ta'awun artinya saling membantu atau saling menolong yang terdapat dalam ajaran Islam, antara lain perilaku dari Nabi Muhammad dalam membina persaudaraan dan saling membantu antara kaum Muhajirin dan Ansor ketika Hijrah ke Medinah sehingga koperasi sebagai wadah menyalurkan kegiatan fungsional yang membawa kemaslahatan seluruh warga. Dengan demikian kegiatan koperasi dalam pondok pesantren lebih banyak diarahkan sebagai mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Agama Islam dalam rangka hablumminannas (beramal nyata pada manusia) dan sekaligus hablumminallah (beribadah kepada Allah). Dengan kata lain partisipasi dalam koperasi merupakan perilaku overt yang dapat digolongkan sebagai amal nyata dan ibadah kepada Tuhan.

Dalam masyarakat Islam pada umumnya nilai-nilai seperti di atas ini memang ada, tapi kurang determinan seperti di pesantren. Dalam masyarakat pondok pesantren nilai-nilai tersebut masih mewarnai perilaku setiaparganya, dalam berbagai amal dan ibadah dan termasuk di dalamnya dalam hal berkoperasi. Motivasi berkoperasi tidak hanya berorientasi pada imbalan (sistem penghargaan) yang bersifat duniawi, tapi juga bersifat ukhrowi. Dengan kata lain terdapat semacam tradisi dan keunikan dalam sistem

penghargaan yang dikembangkan dalam kopontren. Hal itu terungkap dari kasus yang terjadi pada Kopontren Hidmat Suryalaya bahwa yang menjadi juara dalam menabung mendapat penghargaan berupa piala atau piagam dan bergambar bersama dengan Kiyai Abah Anom. Di Kopontren Gontor Ponorogo bahwa mereka yang direstui atau dipercaya menjadi pengurus atau pelaksana Kopontren itu sudah merupakan hadiah atau penghargaan yang tinggi, karena mereka akan berkesempatan berbuat kebajikan untuk jumlah warga kopontren yang ribuan orang. Jadi adanya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) bukanlah tujuan utama. Dengan demikian berkoperasi dalam pondok pesantren bukanlah semata-mata akibat perubahan dari aspek kognitif saja, tetapi juga didorong oleh sistem nilai yang bersumber dari ajaran Islam dan tradisi yang telah mapan di dalamnya.

Dari sekian banyak masalah perkoperasian dalam lingkungan pondok pesantren dan sekitarnya masalah utama adalah berkisar pada pembinaan sumber daya manusia dengan pendekatan pendidikan luar sekolah. Pembahasan mengenai pengadaan sumber daya lainnya misalnya permodalan, dan perkembangan ekonomi nasional yang merupakan variabel-variabel determinan terhadap koperasi merupakan obyek penting dari studi lain. Masalah perputaran modal, produk koperasi akan disinggung sepintas lalu untuk menganalisis fakta keberhasilan dari beberapa Kopontren yang relatif sukses.

## B. Variabel-variabel Penelitian

Tumbuhnya koperasi sebagai organisasi ekonomi di pesantren merupakan fenomena baru. Dikatakan demikian karena pertumbuhan Kopontren secara meluas dalam lingkungan pondok pesantren sekitar dua dekade belakangan ini. Hal itu tidak berarti bahwa sebelum tahun 1960-an koperasi di pondok pesantren belum tumbuh. Di pondok pesantren "Tebu Ireng" di Jombang koperasi telah lama didirikan. Pesantren "Darussalam" di Gontor Ponorogo, menggiatkan koperasi santri setelah beberapa tahun pesantren itu didirikan, dan pesantren Roudatul Tolibin di Cirebon telah mendirikan koperasi semenjak masa prakemerdekaan.

Dalam kegiatan kopontren para kiyai pada umumnya mempercayakan pada para guru atau santri senior dari pondok pesantrennya untuk mengelolanya. Hal itu bukan berarti bahwa para kiyai menjauhi bidang pembinaan ekonomi. Ada di antara kiyai, guru pesantren yang membuka usaha dagang secara individual untuk memenuhi keperluan hidup keluarganya di samping menjalankan fungsinya di pondok pesantren. Dengan tumbuhnya koperasi dalam tumbuh pondok pesantren maka adanya usaha-usaha individual dalam perkampungan pesantren menimbulkan masalah tersendiri.

Keterlibatan para kiyai dan santri dalam perkoperasian di luar pondok pesantren bukanlah hal yang baru, terbukti dari pertumbuhan Serikat Dagang Islam pada

1912 dan kemudian menjadi gerakan Partai Syarikat Islam Indonesia. Gerakan tersebut merupakan salah satu komponen yang tidak kecil dalam Kebangkitan Nasional di Indonesia. (Deliar Noer, 1980, h. 115). Prinsip saling menolong atau ta'awun yang terkenal dengan istilah gotong royong merupakan prinsip dasar dalam mendirikan pondok pesantren. Bahkan menurut sejarahnya banyak di antara pondok pesantren dibangun mulai dari bangunan yang sederhana secara gotong royong oleh masyarakat Islam yang dipimpin oleh kiyai sebagai pelopornya. Dengan kata lain beberapa prinsip esensial koperasi misalnya kekeluargaan, kebersamaan, saling membantu memang telah menjadi nilai-nilai luhur dalam kultur pondok pesantren.

Dalam pondok pesantren itu sendiri dan lingkungannya, meskipun tanpa diorganisasi memang telah tumbuh semacam "tali persaudaraan" yang erat sehingga setiap individu merasa tak terpisahkan dengan individu lainnya. Dalam pondok pesantren yang mengembangkan aliran tariqat tertentu maka siapa saja yang masuk secara resmi dalam warga pesantren tersebut adalah "ikhwan" yang berarti saudara. Dengan demikian setiap warga pondok pesantren yang satu dengan lainnya telah bertalian dengan erat dan merasa lebih dekat, bahkan melebihi persaudaraan atas dasar hubungan darah. Dalam pondok pesantren yang tidak mengembangkan aliran tariqat, rasa persaudaraan itu juga tetap akrab karena para santri merasa satu guru yaitu



dari kiyai yang sama; merasa senasib dan sepejuangan dalam menuntut ilmu. Rasa keterikatan itu lebih terbina melalui organisasi ikatan santri atau ikatan alumni yang dikokohkan atau "dipateri" dengan rasa keterikatan batin dengan kiyai atau figur yang dominan sebagai pemimpin yang dipanuti dalam pesantren tertentu. Ikatan batin antara santri dengan kiyainya pada umumnya sangat erat. (Nurcholis, 1974; Dawam R (Ed), 1974, h. 108). Karenanya sering terjadi banyak santri yang telah pulang ke desanya, suatu waktu kembali ke pesantrennya hanya ingin bertemu atau meminta restu atau nasehat dari kiyainya. Jadi ada semacam komitmen emosional dan sosial pada individu-individu dalam lingkungan pondok pesantren. Kecenderungan yang seperti itu jarang sekali tampak pada lembaga pendidikan lainnya.

Jadi keunikan dalam kehidupan pondok pesantren adalah terbinanya semangat solidaritas yang merupakan faktor pengikat dalam koperasi, dan hal itu sudah ada sebagai sistem nilai yang mengkristal. Sistem nilai seperti itu terjadi karena setiap insan yang bernaung dalam pendidikan pondok pesantren harus meresapi dan mewujudkan kebersamaan, kekeluargaan, kesederhanaan, kemandirian, kejujuran dan keikhlasan (Widiastomo dan Sudirman, Kompas, Desember, 1984).

### 1. Identifikasi Variabel

Meskipun koperasi dapat tumbuh dan sukses jika digerakkan oleh para pengurus yang terampil, penuh kreativitas, tersedianya modal untuk mengembangkan usaha dan diterapkan ketentuan-ketentuan administrasi yang baik, namun faktor-faktor keterlibatan seluruh anggotanya tak dapat diabaikan. Pengabaian keterlibatan para anggota, kalau pun tidak seluruhnya atau sebagian saja dari anggotanya, akan mengakibatkan koperasi itu bukan lagi sebagai koperasi atau koperasi semu (H. Soewardi, 1985; Ch. Djamhari, ed, 1985, h. 46). Dikatakan demikian karena ada atau tidaknya partisipasi anggota adalah penentu utama.

Dalam hal partisipasi anggota berkoperasi, Mubyarto mengemukakan pendapatnya dalam ceramah di depan pejabat Departemen Koperasi dan Biro Logistik (Bulog) di Jakarta (Pikiran Rakyat, 1986) bahwa koperasi sebagai tiang pokok penyangga ekonomi rakyat banyak, akan kuat apabila peran serta anggotanya benar-benar berjalan secara aktif dan efektif. Hal itu cukup beralasan karena partisipasi anggota secara menyeluruh merupakan sendi dasar koperasi. (I. Suwandi, 1985; Ch. Djamhari, ed, 1985, h. 35). Dengan demikian pengabaian partisipasi anggota dalam berkoperasi yang bagaimanapun intensitasnya bukan saja telah merubah status koperasi, tapi juga bertentangan dengan sendi

dasar dari koperasi.

Terjadinya partisipasi yang tinggi dari anggota, dipengaruhi oleh variabel-variabel independen yang bersumber dari pengaruh komunikasi dan pendidikan yaitu keterbukaan menerima gagasan koperasi, komitmen sosial dan persepsi mengenai koperasi. Di lain pihak partisipasi berkoperasi juga tumbuh dan meningkat, diduga karena pengaruh penampilan pengurus dan sistem nilai yang berkembang dalam pesantren yaitu variabel-variabel kredibilitas dan gaya kepemimpinan pengurus serta sistem penghargaan yang bersifat duniawi dan ukhrowi.

Oleh karena ada atau tidaknya partisipasi anggota merupakan hal yang mendasar maka ia menjadi variabel yang merupakan fokus sentral dalam penelitian ini. Adanya variabel itu diduga tidak luput dari pengaruh variabel-variabel independen yang berasal dari pengaruh pendidikan, komunikasi, kepemimpinan dan sistem nilai. Dengan demikian partisipasi anggota dalam berkoperasi diperlakukan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini.

Selanjutnya, variabel-variabel dalam penelitian ini akan diuraikan satu demi satu sebagai berikut:

#### 1) Partisipasi dalam koperasi (Y)

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan berarti masyarakat ikut serta atau mengikuti dan menyertai gerakan tertentu misalnya gerakan pembangunan yang

dilakukan pemerintah. Partisipasi itu dapat saja aktif atau sebaliknya. Partisipasi aktif apabila orang menerima bahkan mengajak orang lain untuk ikut melibatkan diri dalam program pembangunan yang sedang dikembangkan. Partisipasi pasif, orang tidak menolak program pembangunan yang sedang dilakukan tapi ia tidak melibatkan diri atau berperilaku yang negatif terhadap upaya pembangunan.

Partisipasi dalam gerakan apa saja dapat diwujudkan dalam bentuk buah pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan dan kemahiran dan partisipasi sosial (Santoso dan Anwas, 1974). Dalam gerakan koperasi bentuk-bentuk partisipasi secara keseluruhan seperti dikemukakan di atas sangat dikehendaki. Apabila anggota koperasi dapat mewujudkannya maka terdapatlah partisipasi berkoperasi yang ideal (H. Soewardi, 1985). Dalam operasionalnya partisipasi yang seperti itu dalam perkoperasian masih merupakan harapan sampai saat sekarang ini.

Partisipasi anggota dalam berkoperasi dapat dirumuskan sebagai keikutsertaan para anggota secara menyeluruh dalam pengambilan keputusan penetapan kebijakan arah dan langkah usaha, dalam pengawasan terhadap jalannya usaha, dalam pemanfaatan pelayanan usaha dan menikmati sisa hasil usaha (H. Soewardi, 1985; Ch. Djamhari, ed., 1985, h. 46). Dalam rumusan di atas keikutsertaan para anggota dalam pendidikan koperasi secara eksplisit tidak

terlihat. Oleh karena itu keikutsertaan para anggota koperasi dalam pendidikan atau bimbingan koperasi mungkin dianggap 'tidak penting' bahkan dilupakan.

Konsep partisipasi di sini diartikan sebagai perilaku overt para anggota koperasi termasuk pengurus dalam organisasi koperasi tersebut. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat disebut sebagai partisipasi atau keikutsertaan dalam berkoperasi terwujud dalam aktivitas-aktivitas seperti: rapat-rapat koperasi, membayar simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, membayar cicilan hutang secara teratur (bagi mereka yang berhutang), membeli segala keperluan dari koperasi (jika tersedia) atau menjual hasil produksi anggota kepada koperasi (jika dapat menampung), mengikuti pendidikan koperasi dan sebagainya.

Studi Amin Azis di sekitar Jakarta dan Jawa Barat (1982) menunjukkan bahwa produk koperasi memang meningkat walaupun partisipasi anggota ternyata rendah sekali. (Swasono, 1983, h. 262). Dalam studi itu tidak terungkap faktor-faktor apakah yang menyebabkannya, sehingga hal itu merupakan "celah" yang akan disoroti. Mengingat fungsi Kopontren merupakan tempat pembinaan calon kader pembangunan spiritual dalam masyarakat pada masa datang, adanya partisipasi aktif dalam berkoperasi sangat berarti sekali dalam hal memahami seluk-beluk dan pengalaman dalam koperasi. Oleh karena itu pada tempatnya jika



partisipasi anggota dalam berkoperasi di Kopontren merupakan fokus dari studi penelitian ini.

## 2) Keterbukaan menerima ide Koperasi (X<sub>1</sub>)

Dalam kehidupan pondok pesantren sehari-hari dan kegiatan yang ada didalamnya, mustahil ia memencilkan dirinya dari pengaruh sekitarnya. Karena sedikit atau banyak, lembaga tersebut tersentuh oleh berbagai informasi terutama hal-hal yang berkenaan dengan koperasi, baik yang tersalur melalui media massa maupun jalur pendidikan. Berbagai informasi atau pembinaan mengenai koperasi itu sudah tentu sangat berguna untuk mengembangkan usaha-usaha dari koperasi.

Informasi tentang koperasi relatif cukup banyak, demikian juga tentang materi pendidikan koperasi yang diberikan dalam latihan atau penataran koperasi. Namun demikian hal itu tergantung pada sikap menerima atau sebaliknya dari pengurus dan para anggota. Mengingat tidak seluruh pondok pesantren selalu terbuka terhadap ide-ide baru, maka pesantren itu sekurang-kurangnya menyaring ide-ide dari luar untuk dipilih sesuai dengan konsep atau gagasan yang telah ada. Seperti diketahui tidak semua prinsip koperasi yang asalnya dari Barat itu sesuai dengan prinsip-prinsip saling menolong (ta'awun) yang memang telah berakar dalam kultur pesantren. Prinsip-

prinsip organisasi koperasi yang ditata menurut pandangan modern belum tentu serasi dengan tatanan organisasi pondok pesantren yang masih sederhana atau tradisional. Oleh karena itu bagaimana jelasnya informasi atau betapa baik dan bergunanya materi pendidikan koperasi yang diberikan tidak akan ada artinya jika tidak ada keterbukaannya dalam menerima ide koperasi. Jadi variabel ini dianggap penting untuk dianalisis dalam studi ini.

### 3) Komitmen Sosial (X<sub>2</sub>)

Pada setiap orang terdapat potensi untuk bergabung atau sebaliknya dalam suatu kegiatan sosial, baik dalam kelembagaan maupun keorganisasian. Kehadiran koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial dalam pondok pesantren bukan mustahil dianggap sesuatu yang asing yang datang dari luar dengan ciri-cirinya yang menghendaki adanya sikap rasional, progresif, pembagian kerja yang jelas agar tercapai tujuan secara tepat dan produktif. Koperasi dibentuk oleh anggota, dari anggota dan untuk anggota (I. Suwandi, 1985; Ch. Djamhari, 1985, h. 42). Oleh karena itu koperasi memerlukan kebersamaan atau kekitaan dan kesetiaan yang ditumbuhkan dalam organisasi. Dengan adanya koperasi sebagai wadah yang dipergunakan untuk mencapai kesejahteraan secara bersama di atas pencapaian untuk kepentingan pribadi, apakah para warga pesantren terpanggil untuk berada di dalamnya, hal

itu merupakan masalah.

Sebagai warga pondok pesantren, tanpa kehadiran organisasi apapun sebenarnya telah terbina komitmen sosial yaitu pertalian yang disebut ikhwan, atau ikatan senasib dan seperjuangan. Dengan adanya koperasi sebagai organisasi, maka komitmen sosial itu ditransfer menjadi komitmen sosial yang bersifat sosio-ekonomik yang diwarnai oleh nilai-nilai agama.

Apabila banyak warga pondok pesantren yang menjadi anggota Kopontren yang diikat oleh komitmen sosial yang kuat dalam berkoperasi maka diduga bahwa kiyai pesantren dan para pembantunya terutama para pengurus Kopontren berhasil dalam dua hal yaitu (1) mendorong warga kopontren menjadi anggota koperasi dan (2) mentransfer komitmen sosial yang memang telah berakar dalam pesantren ke dalam organisasi koperasi. Keberhasilan dalam kedua hal itu besar kemungkinan melalui pendidikan atau bimbingan koperasi yang dilancarkannya melalui kegiatan pendidikan luar sekolah.

Dengan demikian adanya komitmen sosial dalam kalangan anggota kopontren dipandang penting dan ini merupakan variabel pendidikan.

#### 4) Persepsi Terhadap Koperasi ( $X_3$ )

Perasaan terpanggil lalu menjadi anggota koperasi, lalu terbentuk pula komitmen sosial sehingga terwujud

perilaku overt dalam bentuk partisipasi berkoperasi, mesti didahului oleh proses terbentuknya persepsi terhadap koperasi. Persepsi tersebut diperoleh melalui proses kognitif mengenai seluk beluk koperasi, baik dari segi tata cara berkoperasi, mengenal dasar dan tujuan yang akan dicapai koperasi, jenis usaha koperasi, mengenal tugas dan kewajiban sebagai anggota dan juga tugas dan tanggung jawab pengurus kepada anggota.

Pada setiap anggota koperasi yang ideal harus ada: (1) usaha yang viabel (yang mungkin dapat tumbuh) untuk dikembangkan; (2) melaksanakan demokrasi ekonomi; dan (3) bersedia untuk secara bersama memperjuangkan ekonominya (H. Soewardi, 1985). Adanya persepsi mengenai ketiga kriteria tersebut tidaklah secara otomatis apabila seseorang terdaftar sebagai warga koperasi. Pembinaan persepsi yang seperti itu di kalangan anggota koperasi melalui pre-service training atau in-service training terhadap para warga koperasi. Menurut Soewardi pembinaan persepsi seperti itu di Philipina melalui program yang disebut sebagai "pre membership education". Mereka yang lulus dari program pendidikan seperti itu barulah diterima sebagai anggota.

Dengan kata lain persepsi terhadap koperasi secara komprehensif tidak mungkin terbentuk dengan sendirinya tanpa melalui proses belajar, sekurang-kurangnya memahami seluk-beluk koperasi melalui media-massa. Oleh karena

itu persepsi terhadap koperasi sebagai variabel penting yang muncul sebagai produk pendidikan, dipandang penting untuk diungkapkan dalam kaitannya dengan partisipasi anggota dalam berkoperasi.

#### 5) Kredibilitas Pengurus Kopontren ( $X_4$ )

Kegagalan koperasi banyak dipengaruhi oleh kesan buruk atau "trauma" kegagalan di masa lampau. Hal itu terungkap dari beberapa kasus tindak pidana karena manipulasi/korupsi dalam lingkungan korupsi yang selalu dimuat dalam media cetak. Menurut Soewardi (1985) kasus makin membengkaknya hutang dan kerugian KUD bukan saja karena manipulasi dan korupsi di kalangan pengurusnya tapi juga tak terpenuhinya syarat viabilitas usaha. Kasus tersebut, tidak boleh tidak berkaitan dengan kredibilitas pengurus koperasi terutama dari aspek kejujuran dan loyalitasnya terhadap seluruh warga koperasi.

Image buruk mengenai koperasi mesti diatasi dengan penampilan para pengurus koperasi yang dapat meyakinkan para anggota. Untuk meyakinkan para anggota harus dijauhan hal-hal yang dapat menimbulkan kecurigaan, kegiatan-kegiatan yang terselubung dan menguntungkan pribadi para pengurus. Dengan kata lain pengurus koperasi harus membuktikan kredibilitasnya dari segala perilakunya terutama yang berkenaan dengan tanggung jawab masalah materi, ilmu dan keterampilannya dalam mengelola koperasi.



Dalam kasus Kopontren diduga, kecenderungan adanya hal-hal yang mendatangkan ketidakpercayaan dapat direduksi, mengingat kedudukan kiyai dan para pembantunya cukup terpercaya di mata para warga. Namun demikian belum tentu demikian halnya mengenai kemampuan mengelola koperasi terutama jika ditinjau dari aspek-aspek lain yaitu kredibilitasnya dalam: (1) pengetahuan dan seluk beluk perkerasian, (2) pengalaman dalam mengelola koperasi; dan (3) keterampilannya dalam mengelola organisasi koperasi.

Kredibilitas pengurus ini diduga ada kaitannya dengan kesanggupannya dalam membimbing atau memberikan pendidikan koperasi atau mendorong terwujudnya partisipasi anggota dalam berkoperasi.

Dengan demikian maka variabel kredibilitas pengurus dianggap penting untuk ditelusuri dalam studi penelitian ini.

#### 6) Gaya Kepemimpinan Pengurus (X<sub>5</sub>)

Aspek lain dari kepemimpinan pengurus koperasi yang mempengaruhi gerak organisasi dan dinamika para warga koperasi ialah gaya kepemimpinan yang diterapkan. Gaya kepemimpinan pengurus yang otoriter misalnya akan berbeda pengaruhnya terhadap perilaku anggota dengan gaya lainnya, dan dengan gaya tersebut tercermin bagaimana pengurus menggerakkan para anggota agar bersedia memikul tugas dan tanggung jawabnya. Hal itu berkaitan erat

dengan salah satu dari tiga prinsip koperasi yaitu: manajemen dan pengawasan secara demokratik terhadap organisasi koperasi secara keseluruhan, khususnya aspek usahanya (A. Hasan, 1985; Swasono, ed, 1985, h. 171).

Berdasarkan gaya itu juga tercermin bagaimana pengurus tampil dalam melayani para anggota, bertindak mengatasi hal-hal yang merugikan anggota, mengatasi krisis yang terjadi dalam koperasinya dan dalam mengambil keputusan penting untuk menyelamatkan usaha-usaha yang dikembangkan.

Dalam kasus kepemimpinan Kopontren ada kecenderungan bahwa para pengurus merupakan "copy" atau "duplikat" dari kepemimpinan pondok pesantren. Dengan demikian gaya kepemimpinannya tidak akan jauh coraknya dari sumber atau pemimpin yang mendelegasikan wewenang kepadanya. Oleh karena itu keputusan-keputusan yang diambil oleh kopontren itu mungkin saja melibatkan para anggota atau tergantung pada kelompok "elit" dalam pondok pesantren.

Jadi, variabel gaya kepemimpinan pengurus ini dianggap penting.

#### 7) Sistem Penghargaan ( $X_6$ )

Tingkat partisipasi anggota dalam berkoperasi tidak akan terlepas oleh adanya dorongan atau motivasi yang internal dan eksternal. Sebagai motivasi internal dalam berkoperasi, yang dimiliki anggota ditandai dengan

adanya kesadaran dalam diri seseorang anggota pengurus atau anggota biasa dan secara ikhlas untuk menolong sesama warga yang nasibnya ditimpa oleh kesempitan, menghimpun modal dan usaha secara bersama lalu mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan dengan harga yang wajar. Sekiranya ada keuntungan dapat dinikmati secara bersama melalui pembagian Sisa Hasil Usaha pada akhir tahun buku. Dari kasus keberhasilan Koperasi "Setia Kawan" di Nongkojajar Pasuruan di Jawa Timur pada 1984 salah satu faktor pendukungnya secara intern, ialah pemberian motivasi yang terus menerus kepada anggota (Noerwyndho, 1985, Swasono, ed, 1985, h. 211).

Tidak semua warga koperasi memiliki motivasi internal, oleh karena itu perlu sekali ditampilkan sesuatu yang merupakan motivasi eksternal misalnya dengan memberikan hadiah atau penghargaan, sekurang-kurangnya pujian bagi seseorang yang partisipasinya tinggi sebagai warga koperasi misalnya memberikan kupon yang berhadiah untuk yang berbelanja dalam jumlah yang besar nilainya dan cara lain-lain lagi.

Sistem penghargaan dalam berkoperasi dapat diwujudkan dalam bentuk insentif material dan nonmaterial. Pada koperasi, adanya pembagian sisa hasil usaha pada akhir tahun buku misalnya berupa bingkisan Hari Raya atau Tahun Baru merupakan hal yang lazim. Pada Kopontren pembagian sisa hasil usaha (SHU) bukan

merupakan insentif yang merupakan dorongan utama, karena nilai-nilai pengembangan koperasi pesantren didasari oleh prinsip bahwa dengan berkoperasi secara aktif berarti mewujudkan suatu amal nyata kepada sesama manusia dan sekaligus beribadah kepada Allah SWT. Dengan berpartisipasi dalam koperasi bagi warga Kopontren telah berbuat salah satu kebajikan atau melakukan investasi duniawi dan ukhrowi. Oleh karena itu adanya kesadaran terutama keikhlasan dalam berkoperasi dibina secara serius dalam Kopontren oleh kiyai serta para pembantunya.

Dengan adanya sistem penghargaan memang terdapat 'pemaksaan' untuk mendorong terwujudnya perilaku yang dikehendaki. Apabila seseorang tidak melaksanakannya ada semacam sanksi atau ancaman yang merupakan sistem hukum-an yang tertulis atau tak tertulis.

Dalam setiap lembaga atau organisasi sistem penghargaan atau sebaliknya selalu dijumpai. Setiap penyimpangan perilaku dapat dalam bentuk pelanggaran hukum atau moral. Sebagai sistem hukuman terhadap perilaku yang tak diharapkan dalam masyarakat terhadap seseorang yang tidak amanah atau kurang dapat dipercaya, dengan cara mengeluarkan dari kelompoknya atau tidak diberi tugas yang 'basah'. Dalam lingkungan pesantren mereka yang seperti itu disisihkan pergaulannya dengan kiyai, misalnya tak pernah disapa atau tak diberi tugas apapun oleh kiyai. 'Hukuman' tersebut telah menyusahkan perasaan seorang warga pesantren dan

lebih sengsara lagi jika sampai dicela atau dikutuk di-depan seluruh warga pesantren oleh kiyainya.

### C. Masalah Penelitian

#### 1. Masalah Umum

Gerakan koperasi di Indonesia telah tumbuh dan berkembang sekitar 90 tahun yang lalu. Dalam jaman kemerdekaan telah pula didukung secara konstitusional sehingga menjadi sokoguru ekonomi nasional. Selanjutnya telah dikembangkan pula usaha-usaha pembinaan melalui berbagai jalur pendidikan/komunikasi, namun masih terdapat beberapa masalah yang belum dapat diatasi. Di antara masalah-masalah yang dipandang cukup mendasar adalah :

- (1) Warga masyarakat yang berintegrasi dalam gerakan koperasi masih terbatas; sebagian besar dari bangsa Indonesia masih enggan menjadi anggota koperasi.
- (2) Memang ada sejumlah koperasi yang relatif sukses usaha-usahanya, dan mampu mendistribusikan sisa hasil usahanya (SHU) kepada para anggotanya, namun secara kuantitas partisipasi aktif para anggotanya masih terbatas. Mereka yang berpartisipasi aktif itu pun ternyata secara kualitas belum mencakup seluruh aspek yang dikehendaki dari padanya.
- (3) Secara kuantitas Koperasi non-KUD dan KUD beserta para anggotanya terus meningkat dari masa



ke masa, seterusnya diikuti pula oleh peningkatan dalam perputaran modal usaha Koperasi, simpanan anggota dan SHU. Namun bagian riil koperasi dalam perekonomian nasional masih rendah, sedangkan Produk Domestik Brutonya hanya paling rendah daripada perusahaan negara dan perusahaan swasta (perorangan atau kelompok).

Dalam UU No. 12 tahun 1967 tertulis dengan jelas bahwa koperasi Indonesia landasan idealnya adalah Pancasila, landasan strukturalnya ialah UUD 1945, serta landasan mentalnya adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi (Sukanto, 1984, h. 67). Landasan mental (setiakawan dan kesadaran berpribadi) mesti dimiliki oleh setiap anggota koperasi. Dengan adanya landasan mental tersebut pada setiap anggota, akan merupakan prasyarat terwujudnya partisipasi berkoperasi. Yang perlu dipertanyakan dapatkah landasan mental dan dorongan untuk berpartisipasi aktif setiap anggota koperasi tumbuh dengan sendirinya, tanpa ada usaha-usaha khusus untuk membinanya secara sungguh-sungguh?

Dalam pembinaan dan pengembangan koperasi yang paling didambakan ialah adanya tiga sehat dalam koperasi, yaitu Sehat Organisasi, Sehat Usaha dan Sehat Mental. Oleh karena Ke-Tuhanan Yang Maha Esa merupakan Sila Pertama dari Pancasila maka sehat mental

dalam berkoperasi erat kaitannya bukan saja dengan kesadaran, keinginan, emosi dan kehendak tapi juga dengan sistem nilai agama yang dianut warga koperasi.

Yang paling banyak mendapat perhatian adalah berbagai upaya agar koperasi itu sehat usahanya, setelah itu sehat organisasi atau kedua aspek itu dikembangkan secara serentak. Mengenai sehat mental selalu dianaktirikan atau dilupakan. Oleh karena itu tidak heran jika sering terjadi "kecelakaan" dalam tubuh koperasi. Dengan kata lain sering terjadi ketakseimbangan pembinaan koperasi dipandang dari prinsip tiga sehat dalam koperasi.

Dalam upaya membina kesadaran dan motif berprestasi dalam berbagai sektor misalnya pertanian, keluarga kecil tapi sehat, pemeliharaan lingkungan hidup, hidup sehat, perkoperasian dan lain-lain program-program bimbingan/penyuluhan dan sistem penghargaan dalam sektor-sektor di atas telah dikembangkan. Adanya sistem penghargaan (sistem hadiah) dapat menimbulkan motif intrinsik demi suksesnya pembangunan dalam seluruh sektor yang telah disinggung di atas. Dalam upaya penyuluhan lapangan dalam lingkungan koperasi, sepintas lalu tidak begitu gencar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Sistem penghargaan

dalam lingkungan koperasi lebih banyak menonjolkan penampilan kelompok dan keberhasilan fisik koperasi, sedangkan penampilan yang bersifat mikro (individu) dan keberhasilan nonfisik kurang ditonjolkan. Mengapa demikian halnya merupakan masalah yang belum jelas.

Jika dikaitkan masalah-masalah umum perko-  
perasian yang mendasar di atas dengan upaya pembina-  
an dan sistem penghargaan yang cenderung ke arah  
keberhasilan koperasi secara fisik (keduniaan) saja,  
maka hal itu tidak selaras dengan "watak" Koperasi  
Indonesia yang dapat memenuhi tuntutan duniawi se-  
bagai jembatan untuk mencapai kebahagiaan ukhrowi.  
Pembinaan koperasi tak dapat dilepaskan dengan sis-  
tem nilai keagamaan yang tetap dijunjung tinggi dan  
tercakup dalam falsafah negara yang berdasarkan  
Pancasila. Dengan kata lain upaya pembinaan dan pe-  
ngembangan koperasi terutama dalam aspek sumber daya  
manusia yang berperan sebagai apa saja dalam perko-  
perasian, masih memerlukan pengkajian atau studi  
lebih jauh.

## 2. Masalah Khusus

Studi penelitian ini dilakukan dalam lingkung-  
an koperasi pondok pesantren dan sebagai fokus sen-  
tralnya adalah:

- a. Pengkajian masalah partisipasi anggota dalam berkoperasi yang dikaitkan dengan: (1) ciri-ciri psikis anggota yang terbina melalui pendidikan dan komunikasi yaitu keterbukaan menerima ide koperasi, komitmen sosial, dan persepsi, (2) penampilan pengurus dari aspek kredibilitas dan gaya kepemimpinan pengurus kopontren, dan (3) sistem penghargaan yang berkembang di pondok pesantren; sebagai salah satu sistem nilai ajaran agama Islam.
- b. Partisipasi aktif berkoperasi para anggota yang ideal meliputi aspek-aspek: (1) menentukan kebijaksanaan koperasi, (2) memenuhi kewajiban dalam pengumpulan modal usaha koperasi, (3) menerima pelayanan dari koperasinya, (4) mengikuti pembinaan/pendidikan perkoperasian, dan (5) mengadakan evaluasi/mengawasi jalannya organisasi dan usaha koperasi.
- c. Konsep ta'awun yang berasal dari ajaran agama Islam telah dijabarkan dalam masyarakat pada umumnya dan lebih jelas lagi dalam pondok pesantren, pada umumnya dalam konteks: (1) sosio-budaya yang diwarnai ajaran Islam, (2) sosio-ekonomik yang ditata dalam organisasi yang sederhana (tradisional), misalnya dalam bentuk arisan, gotong royong

dalam panen dan lain-lain.

- d. Sistem nilai yang diwarnai ajaran Islam diduga mempengaruhi motivasi dalam berkoperasi dalam lingkungan pondok pesantren. Oleh karena itu konsep ta'awun boleh jadi merupakan motivasi berkoperasi pada sebagian besar warga pesantren.

Dari uraian di atas yang merupakan masalah khusus dalam studi penelitian ini dapat disusun dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- (1) Sampai berapa jauh dampak dari keterbukaan menerima ide (sikap terbuka), komitmen sosial, persepsi mengenai ide koperasi, kredibilitas dan gaya kepemimpinan pengurus koperasi dan sistem penghargaan terhadap partisipasi anggota baik secara serempak atau secara sendiri-sendiri?
- (2) Sampai sejauh mana partisipasi para anggota secara kuantitas dan kualitas, dan bagaimana pemanfaatan partisipasi berkoperasi sebagai media belajar?
- (3) Sampai berapa jauh kopontren dapat mentransformasi konsep ta'awun dalam ajaran Islam yang dijabarkan bukan saja dalam konteks sosio-budaya tapi juga dalam konteks sosio-ekonomik yang ditata secara profesional dan berlandaskan sistem nilai yang berkembang dalam pondok pesantren?



- (4) Apakah terdapat perbedaan taraf partisipasi anggota jika dipandang dari aspek-aspek: (a) jauh atau dekat dari kota, (b) koperasi yang berada di pesantren besar atau kecil, (c) kopontren yang telah berbadan hukum atau belum, dan (d) kopontren yang telah lama atau baru didirikan?
- (5) Apakah terdapat perbedaan: (a) pemanfaatan media massa yang digunakan pengurus dan anggota, dan (b) latar belakang tingkat pendidikan anggota pengurus dan anggota biasa?
- (6) Sampai berapa jauh konsep ta'awun merupakan motivasi utama pada kalangan warga pesantren dalam berintegrasi ke dalam koperasi di pondok pesantrennya?
- (7) Dari upaya pendidikan dan latihan perkoperasian yang dilancarkan di pondok pesantren, apakah hasil latihan tersebut dianggap cocok dengan keadaan dan kebutuhan kopontren ?

#### D. Tujuan Penelitian

##### 1. Umum

Studi penelitian ini bertujuan untuk:

a. Mengetahui seluk beluk Kopontren, terutama mengenai tujuan apa yang akan dicapai, sampai sejauh mana kemajuannya dan bagaimana status dan posisinya dengan koperasi-koperasi lainnya.

b. Mengetahui lebih mendalam tentang kopontren dengan berbagai aspeknya, terutama keadaan intern organisasi, usaha dan permodalan, keadaan anggotanya serta jenis-jenis usaha yang dikembangkannya.

c. Mengetahui lebih jauh mengenai pendidikan perkoperasian yang pernah dilancarkan terhadapnya dan bagaimana dampaknya terhadap perilaku berkoperasi atau partisipasi warga kopontren, terutama para anggotanya.

##### 2. Khusus

a. Mengetahui bagaimana dampak dari keterbukaan menerima ide koperasi, komitmen sosial, persepsi mengenai ide koperasi, kredibilitas dan gaya kepemimpinan pengurus serta sistem penghargaan terhadap partisipasi anggota dalam berkoperasi.

b. Mengetahui sampai sejauh mana:

(1) partisipasi para anggota kopontren dalam berbagai aspek yang diharapkan, terutama dalam penjabaran konsep ta'awun dalam kehidupan koperasi dan lebih penting lagi dalam realisasi partisipasi sebagai media membelajarkan.

(2) konsep ta'awun yang telah dijabarkan dalam bentuk

perilaku koperatif yang ditata secara sederhana atau tradisional, ditransformasi menjadi usaha koperasi yang ditata secara profesional.

c. Mengetahui apakah konsep ta'awun menjadi motivasi utama yang mendorong warga pesantren menjadi anggota kopontren.

d. Mengetahui apakah terdapat perbedaan taraf partisipasi pada kopontren yang: (1) pernah ada latihan perkoperasian dan belum pernah, (2) berstatus badan hukum atau belum, (3) berada dalam pondok pesantren besar atau kecil, (4) jauh atau dekat dari kota, dan (5) sudah lama atau baru didirikan.

e. Mengetahui jenis media massa yang mana dimanfaatkan oleh warga kopontren dan bagaimana perbedaan latar belakang tingkat pendidikan warga kopontren.

f. Mengetahui bagaimana dampak dari program-program latihan/penataran koperasi yang telah diluncurkan untuk para personil dari kopontren, apakah relevan dengan keadaan dan kebutuhan kopontren atau belum.

#### E. Kegunaan Dari Penelitian

##### 1. Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat:

a. Menambah keluasan dan kedalaman segi-segi ilmu yang berkaitan dengan obyek studi yang ditelusuri.

b. Mengetahui secara tepat kebenaran dan kekeliruan atau kekuatan dan kelemahan dari teori-teori atau konsep-konsep yang menjadi titik tolak dalam program-program mengenai pembinaan dan pendidikan perkoperasian yang telah dikembangkan. Jika terdapat kekeliruan atau kelemahan, akan mendorong studi lebih lanjut atau mencari usaha-usaha remedial.

c. Mendorong penelitian lebih lanjut.

## 2. Praktis

Hasil dari studi penelitian ini dapat:

a. Merupakan salah satu masukan untuk penyusunan konsep-konsep atau program-program sebagai tindak lanjut dari Pola Pembinaan Koperasi yang tertuang dalam SKB Menkop, Menag, dan MUI tahun 1985.

b. Menjadi bahan orientasi dalam penyusunan konsep-konsep atau program-program pembinaan dan pendidikan koperasi pada masa yang datang, apakah dalam rangka penyempurnaan atau usaha remedial. Sekurangnya menjadi bahan orientasi atau perbandingan bagi para tokoh pendidikan pondok pesantren atau para peminat lainnya dalam rangka pembinaan dan pembinaan kopontren atau koperasi yang mirip dengannya.

c. Menjadi bahan perbandingan bagi kopontren yang telah mapan dan sukses, serta merupakan

dorongan bagi kopontren yang sedang dalam mengadakan persiapan untuk meningkatkan kualitas dan jenis usaha-usahanya dan yang sedang menyiapkan diri untuk mendirikan kopontren.

#### F. Pembatasan Lokasi Penelitian

Fakta empirik menunjukkan bahwa koperasi telah tumbuh dalam pondok pesantren di berbagai propinsi di Indonesia, terutama di Jawa dan Madura. Dari statistik mengenai keberadaan kopontren terlihat bahwa di Jawa Barat terdapat kopontren yang terbanyak dibandingkan dari propinsi lainnya. Di samping itu dari segi pembinaan khusus untuk kopontren ternyata bahwa Pemerintah Daerah Jawa Barat lewat Badan Kordinasi Koperasi Pondok Pesantren cukup tanggap dan sungguh-sungguh. Di daerah lain Bakor Kopontren belum tumbuh dan pembinaan kopontren menjadi garapan Balatkop atau anggota LSM tertentu.

Di samping faktor-faktor di atas dalam hal perkoperasian daerah Jawa Barat, terutama Tasikmalaya cukup terkenal. Banyak peristiwa perkoperasian yang penting terjadi di daerah itu, salah satu di antaranya ialah penetapan DR. Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, pada tanggal 12 Juli 1947, ketika dilangsungkan Kongres Koperasi Indonesia Pertama (Eddiwan, 1983; Swasono, ed, 1983, h. 127). Di propinsi itu juga terdapat lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang telah banyak mewisuda pa-



para sarjana dan kader-kader koperasi misalnya IPB di Bogor, Akademi Koperasi 12 Juli di Bandung kemudian menjadi Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) dan lain-lain.

Atas pertimbangan tersebut di atas, maka studi penelitian ini memilih sejumlah kopontren untuk studi pendahuluan dan penelitian sebenarnya yang berada di daerah Jawa Barat. Dalam studi perbandingan dan mendapatkan data yang komprehensif, ada beberapa kopontren di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur juga diteliti.

Mengenai ciri Umum Jawa Barat dari aspek demografik dan kehidupan ekonomi, secara sepintas dapat digambarkan sebagai berikut. Luas Jawa Barat 2,46% dari luas seluruh Indonesia dengan jumlah penduduk 21.632.684 jiwa pada tahun 1971 telah meningkat menjadi 24.457.689 jiwa pada tahun 1978. Rata-rata penduduk pada setiap rumah tangga 4,54 jiwa, pada setiap km 573,10 jiwa. Kenaikan penduduk setiap tahunnya 2,21% pada tahun 1977/1978. Pendapatan rata-rata penduduk perkapita Rp 14.676,00 atau US \$ 38,-; mata pencaharian utama ialah pertanian yang menyerap 54,7%, industri 9,67%, perdagangan 15,36%, pemerintahan dan pertahanan, 3,54% dan jasa 9,6% yang tersebar dalam 4.039 desa (Yudistira G, 1984; ES. Ekadjati, ed, 1984, h. 11-27).

Daerah itu penduduknya mayoritas suku Sunda dan beragama Islam. Pada tahun 1978 terdapat 29486 mesjid, 83713 langgar/mussola, 577 gereja dan 111 buah sarana peribadatan Hindu/Budha. Pada tahun 1969 terdapat 25.253 tokoh agama Islam yang terdiri dari kiyai, ajengan dan ulama, 4.042 guru ngaji di pesantren dan 14.860 orang guru agama di Madrasah (A.Suhandi, 1984; ES.Ekadjati, ed., 1984, h. 279). Ratio murid terhadap guru di Jawa Barat pada tahun 1977 39 : 1 untuk SD, 409 : 1 untuk SMTP dan 435 : 1 untuk SMTA. Pada tahun 1976 tingkat partisipasi kelompok umur 12 -13 tahun anak-anak kota 97,2% dan anak-anak desa 92,8%, sedang pada tahun-tahun sebelumnya berbeda jauh (Richard P, Prisma, September, 1983, 35).

Khusus mengenai pondok pesantren di Jawa Barat pada tahun 1977 terdapat 2.237 buah dengan 304.747 orang santri (Deliar Noer, 1983, h. 68). Pada tahun 1985 jumlah itu telah meningkat menjadi 3479 buah dengan 8.385 orang ustad/guru Kopontren yang berstatus Badan Hukum 27 buah (Ditjen BLK-Dep.Kop., 1985). Menurut Bakor Kopontren jumlah Kopontren yang berbadan Hukum di Jawa Barat jumlahnya menjadi 42 buah pada tahun yang sama.

Mengingat sangat luasnya daerah Jawa Barat dan jumlah kopontren yang terdaftar pada Bakon Kopontren 109 buah, maka lokasi penelitian dan jumlah Kopontren yang diteliti harus dibatasi. Dalam menentukan lokasi penelitian termasuk

Kopontren manakah yang dipilih sebaiknya dengan cara acak sederhana atau acak sempurna. Berdasarkan beberapa pertimbangan maka pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposif saja.

Sebelum menentukan secara purposif lokasi penelitian lebih dulu ditentukan kriteria acuannya yaitu jarak dan lamanya Kopontren itu telah didirikan.

Setelah dipelajari daftar Kopontren dari Dokumen Bakor Kopontren maka ditentukan beberapa kabupaten bersama sejumlah Kopontren dengan kriteria: a) letaknya jauh dari kota atau sebaliknya dekat; b) berapa lamakah Kopontren itu telah didirikan yaitu: 0 - 2 tahun, 2,1 - 5 tahun dan 5,1 tahun ke atas. Atas dasar kriteria tersebut maka dipilih Kopontren yang dijadikan tempat penelitian.

Atas dasar pokok pikiran itu, secara purposif dipilih 14 pondok pesantren yang telah mengembangkan koperasi pada daerah-daerah, yang tidak terlalu jauh dari Bandung. Di sebelah Timur adalah Kabupaten Garut dan Tasikmalaya; sebelah Utara Kabupaten/Kotamadya Cirebon dan sebelah Barat yang paling jauh adalah Kabupaten Bogor dan Bekasi.

Mengenai jumlah pondok pesantren dan koperasinya, data Departemen Agama dan Bakor Kopontren tidak selalu sama. Sumber data lain mengenai pondok pesantren adalah dari Badan Kerjasama Pondok Pesantren (BKSPP) di Bogor bahwa jumlah pesantren dan koperasinya lebih besar dari yang tercatat

pada kedua sumber data di atas. Menurut BKSPP banyak dari pondok pesantren atau Kopontrennya belum mendaftarkan diri.

Berdasarkan kriteria di atas maka dari 14 kopontren yang terpilih itu dikelompokkan dalam Kategori A, B dan C. Kategori A adalah kopontren yang telah berkembang 5,1 tahun ke atas, kategori B yang sedang berkembang yang usianya 2,1 - 5,0 tahun dan kategori C adalah kopontren yang baru tumbuh atau 0,1 - 2,0 tahun.

Letak lokasi kopontren pada umumnya dalam pondok pesantren masing-masing, kecuali koperasi Hidmat dari pesantren Suryalaya Kabupaten Tasikmalaya yang terpencarpencar jauh dari pondok pesantrennya. Oleh karena itu ada kopontren yang jauh dari kota kabupaten. Kota tersebut, biasanya menjadi pusat perbelanjaan. Jarak 3,1 km lebih dianggap jauh dan yang berada pada radius 0.0 - 3.0 km dianggap dekat. Menurut standar jarak capai untuk 'market cooperatives' maksimum tiga km (Symadas Banerdji dan H. Benyamin Fisher, dalam Journal Koperasi Indonesia, I, Nov. 1984, h. 45).

Kategorisasi tiga sehat yang melahirkan beberapa kelas KUD misalnya kelas A=sangat giat, B=giat, C=cukup giat dan D=kurang giat, belum pernah dilakukan terhadap koperasi pondok pesantren. Oleh karena itu Bakor Kopontren membuat kategori berdasarkan lamanya koperasi didirikan

dan standar jarak saja. Berdasarkan 'usia koperasi', standar jarak capai koperasi dengan pasar pusat perbelanjaan atau kota kabupaten maka ditentukan kopontren tempat penelitian ini di daerah Jawa Barat. Dari segi jenis usahanya ke-14 kopontren itu relatif sama. Dari ke-14 Kopontren yang dipilih dapat terlihat dalam tabel di bawah ini.

TABEL I.1  
PONDOK PESANTREN TAMPAT PENELITIAN

No.	Nama Kopontren/Pesantren	Status	St. Jarak Capai
1.	Darul Fallah Bogor	A	Jauh
2.	Addakwah Sukabumi	A	Jauh
3.	Syamsul Ulum Sukabumi	A	dekat
4.	Cipasung Singaparna	A	dekat
5.	GUPPI Cirebon	B	dekat
6.	Babakan Ciwaringin Cirebon	B	jauh
7.	Al Ulfa Garut	B	jauh
8.	Attaqwa Bekasi	B	jauh
9.	Darunnahwi Indramayu	B	jauh
10.	Daruttaqwa Cibinong Bogor	B	dekat
11.	Wanasari Kabupaten Bandung	C	jauh
12.	Miftahul Huda Manonjaya	C	jauh
13.	Nugraha Kotamadya Bandung	C	dekat
14.	Darul Arqom Garut	C	dekat



Agar lebih jelas, pada peta Jawa Barat pada halaman berikut, lokasi kopontren di atas dapat diperhatikan, kira-kira di mana letaknya.

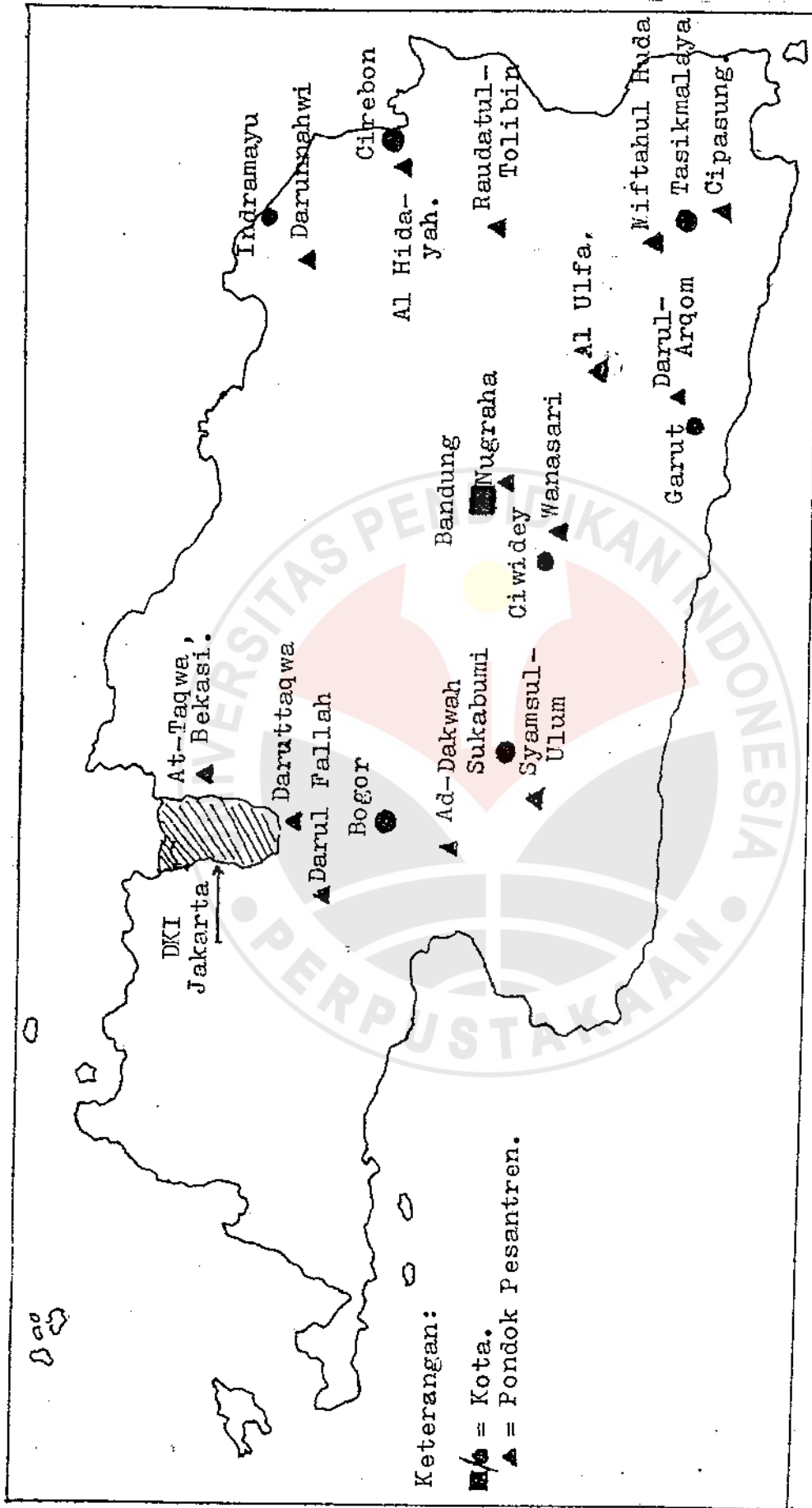
Sebagai alasan dalam memilih kopontren yang ada di Jawa Barat ialah: (a) di daerah ini terdapat koperasi pondok pesantren yang terbanyak di Indonesia, (b) terdapat lembaga pendidikan tinggi yang khusus mendalami perkoperasian, misalnya IKOPIN (AKOP 12 Juli Bandung) dan Institut Pertanian Bogor, (c) terdapat Bakor Kopontren satu-satunya di Indonesia yang membina dan memberikan bimbingan terhadap koperasi-koperasi pondok pesantren dan BKSPP (Badan Kerjasama Pondok Pesantren) yang secara nyata membantu pembangunan sarana nonfisik dan fisik untuk pendidikan di pesantren misalnya bidang kurikulum, sarana keterampilan, sarana air untuk keperluan warga perkampungan pondok pesantren, buku-buku dan lain-lain.

## G. Batasan Istilah

### 1. Pondok Pesantren

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang dilengkapi dengan asrama untuk para santri, perumahan untuk para pengasuhnya, rumah ibadah dan kelengkapan pendidikan lainnya untuk mendalami ilmu-ilmu agama, dengan menggunakan metode khusus kepesantrenan (misalnya bandungan, sorogan) atau dipadukan dengan metode lainnya di bawah bimbingan seorang kiyai atau beberapa kiyai dengan tujuan

PETA DAERAH JAWA BARAT



Gambar 2 : Letak Koperasi Pondok Pesantren yang diteliti.

membina para santri menjadi ulama atau kiyai yang faqih dan luas pandangannya, menjadi muslim yang dapat mempertahankan dan menyebarluaskan ajaran Islam, paling minimal membina para santri menjadi muslim yang berkepribadian dan berbudi luhur misalnya berperilaku yang baik dan suka menolong.

Dalam pondok pesantren pada umumnya terdapat madrasah-madrasah Islam dan ada juga perguruan umum. Madrasah yang berasrama belum tentu merupakan pondok pesantren, apabila tidak menerapkan metode khusus kepesantrenan. Madrasah atau perguruan umum yang bernaung di bawah suatu pondok pesantren, mendorong para santri atau siswanya mengikuti program kepesantrenan. Dalam madrasah yang berasrama atau tidak, program kepesantrenan tersebut belum tentu dikembangkan.

## 2. Koperasi Pondok Pesantren

Koperasi pondok pesantren (Kopontren) adalah organisasi ekonomi yang berorientasi pada undang-undang perkoperasian (UU no. 12 tahun 1967), yang didirikan dalam lingkungan pondok pesantren dan disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam atau kultural pondok pesantren. Para anggota pengurus dan anggota kopontren terdiri dari para pengasuh pesantren, para santri mukim (tinggal di asrama) dan santri kalong. Yang termasuk santri kalong ialah para santri yang tidak mukim dan warga masyarakat di dalam dan

di luar perkampungan pesantren, yang merupakan warga majelis ta'lim atau jamaah mesjid pondok pesantren. Para anggota koperasi tersebut terdiri dari warga pesantren yang belum dewasa dan dewasa. Para pengurusnya pada umumnya terdiri dari mereka yang telah dewasa, sedangkan para pelaksananya ada yang belum dewasa.

### 3. Keterbukaan Menerima Ide Koperasi

Keterbukaan menerima ide koperasi (acceptance) yaitu adanya kesediaan secara psikis menerima atau mengadopsi gagasan koperasi secara sukarela. Kesediaan tersebut bukan saja sebagai pengaruh komunikasi yang persuasif tapi juga karena telah ada gagasan koperasi itu selaras dengan konsep ta'awun yang memang dikembangkan dalam kultur pondok pesantren. Keterbukaan menerima ide dari luar itu memang dapat terjadi sebagai dampak dari adanya komunikasi persuasive atau adanya konsep yang selaras (Cohen, 1984, h. 79).

### 4. Komitmen Sosial

Komitmen sosial ialah dorongan dalam diri seseorang untuk berintegrasi secara ikhlas dan sungguh-sungguh karena adanya ikatan bathin (cohesiveness) misalnya merasa dalam suatu pertalian keagamaan (brotherhood) karena diikat oleh pertalian yang disebut Ikhwan (saudara), senasib dan seperjuangan yang terwujud dalam kegiatan bersama (sosial).

Komitmen sosial merupakan perwujudan kegiatan publik atau behavioral commitment (Cohen, 1984, h. 82) atau dapat juga sebagai paduan dari ciri-ciri kepribadian afiliasi (affiliation) dan berlindung (succorance) (Bischof, 1959, h. 5). Dalam komitmen sosial tersalur dorongan yang kuat yang merupakan ungkapan setia kawan (solidaritas) dan juga solidaritas dalam memberikan atau menerima bantuan dalam keadaan yang sulit.

#### 5. Persepsi Terhadap Koperasi

Persepsi terhadap koperasi adalah gambaran kognitif dari seluk beluk perkoperasian misalnya pengenalan mengenai tugas dan kewajiban anggota, tata cara hidup berkoperasi, pelayanan apakah yang dapat diperoleh dari koperasi dan sebagainya, yang mewarnai kesadaran seseorang dalam berkoperasi. Gambaran kognitif dan kesadaran seseorang itu diwarnai oleh nilai-nilai lingkungan sosialnya (Hovland & Janis, 1950; Cohen, 1984, h. 48). Dalam konteks Kopontren maka persepsi terhadap koperasi diduga diwarnai oleh nilai-nilai yang berkembang di pondok pesantren dan dibentuk melalui pendidikan atau penyuluhan koperasi.

#### 6. Kredibilitas Pengurus Kopontren

Kredibilitas pengurus Kopontren ialah suatu derajat atau harkat yang dimiliki para anggota pengurus Kopontren dalam pandangan para anggota biasa, terutama dalam hal pengetahuan dan seluk-beluk perkoperasian serta keterampilannya



dalam mengelola organisasi Kopontren. Kredibilitas pengurus dari segi kualitas moral pada umumnya, dapat diandalkan. Karena para anggota pengurus Kopontren itu berada dalam organisasi itu setelah 'diseleksi' oleh pimpinan pesantren dari para pembantunya yang memang cukup dipercaya dari aspek moral dan dianggap mampu melaksanakan tugas tersebut.

#### 7. Gaya Kepemimpinan Pengurus Kopontren

Gaya kepemimpinan pengurus Kopontren ialah cara-cara penampilan (keragaan) para anggota pengurus Kopontren dalam mengarahkan, mendorong dan membimbing para anggota untuk mencapai tujuan organisasi ekonomi yang dikembangkan dalam lingkungan pesantren. Dengan cara-cara yang khas para anggota pengurus organisasi mengarahkan segala aktivitas kelompoknya (O. Sutisna, 1983, h. 264).

Pendekatan mengenai gaya kepemimpinan dalam Kopontren berorientasi pada pola tingkah laku yang kontinum yaitu dari gaya kepemimpinan yang otokratis pada ujung yang satu dan gaya laissez-faire pada ujung yang lain (Tannenbaum dan Schmid).

#### 8. Sistem Penghargaan

Sistem penghargaan ialah cara-cara dalam memberikan hadiah (reward) atau kehormatan yang tinggi dan setimpal atas perilaku berkoperasi yang dianggap optimal. Misalnya

penghargaan kepada penabung yang rajin, langganan yang paling banyak membeli barang-barang dari warung koperasi dan semacamnya. Tanda penghargaan tersebut dipersiapkan secara sengaja dan teliti. Sistem penghargaan ternyata ada hubungan bermakna dengan terjadinya perubahan sikap atau terbentuknya motivasi (Brehn & Cohen, 1962, h. 73-78).

Sistem penghargaan yang dikembangkan dalam Kopontren tak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku di pondok pesantren yaitu berorientasi pada konsep tingkah laku menurut ajaran agama Islam. Bahwa segala perilaku (termasuk aktivitas berkoperasi) adalah amal dan ibadah. Setiap amal atau ibadah merupakan investasi dunia dan akhirat yang mendapat penghargaan bukan saja oleh manusia tapi juga oleh Allah SWT.

#### 9. Partisipasi Anggota Dalam Koperasi

Partisipasi anggota dalam koperasi adalah segala perilaku aktif dan nyata (overt) secara menyeluruh dari para anggota Kopontren dalam: pengambilan keputusan dan langkah usaha, dalam pengawasan, dalam pengumpulan modal dan jalannya usaha, pemanfaatan hasil usaha dan pembinaan kualitas warga dalam mencapai tujuan koperasi. Berbagai bentuk perilaku berkoperasi telah diatur secara menyeluruh dan biasanya tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi yang bersangkutan (Amin Aziz, 1982; Swasono, ed, 1983, h. 259).

Dalam konteks Kopontren partisipasi anggota dalam koperasi bukan saja dipandang sebagai integrasi dalam kegiatan yang bersifat sosio-ekonomik saja, tapi juga sebagai kegiatan yang bersifat edukasi. Kegiatan koperasi yang bersifat edukasi di kopontren bermakna sebagai upaya untuk menyiapkan para santri menjadi kader koperasi di samping peran utamanya sebagai kader pembina keagamaan dan kemasyarakatan.

#### H. Beberapa Asumsi

- 1) Bimbingan dan saran-saran yang dilakukan Kiyai' atau para pembantunya mengenai perkoperasian, baik dalam rangka majelis pengajian (taklim), maupun ceramah khusus mengenai koperasi, merupakan pendidikan luar sekolah. Demikian juga bimbingan dan penjelasan dari pengurus kopontren dalam rapat-rapat atau musyawarah kerja dalam pondok pesantren yang menyinggung masalah perkoperasian, merupakan pendidikan luar sekolah dalam rangka membentuk perilaku berkoperasi (partisipasi aktif).
- 2) Warga pondok pesantren yang tergabung sebagai anggota koperasi pesantrennya telah memiliki sikap keterbukaan terhadap gagasan berkoperasi. Hal itu mendorong adanya persepsi dan kesadaran untuk berkoperasi. Kecenderungan itu memungkinkan terwujudnya partisipasi aktif dalam koperasi.

- 3) Adanya bimbingan perkoperasian yang kontinyu dari para pimpinan koperasi pondok pesantren yang berperan aktif, akan mewujudkan kelancaran koperasinya.
- 4) Kiyai pondok pesantren adalah salah satu dari pemimpin nonformal dan pada umumnya cukup dominan dalam masyarakat. Kecenderungan itu karena para Kiyai memiliki kredibilitas yang tinggi dan gaya kepemimpinan yang kebapaan (paternalistik). Dengan kondisi yang seperti itu memungkinkan sekali menggerakkan masyarakat pada umumnya dan para santri pada khususnya untuk melibatkan diri dalam pembangunan masyarakat sekitarnya termasuk dalam pembinaan gerakan koperasi.
- 5) Reward atau penghargaan (hadiah) merupakan salah satu cara untuk mendorong terbentuknya semacam sikap dan perilaku atau perubahan sikap dan perilaku. Sistem itu dikembangkan juga dalam pembinaan koperasi pada umumnya, demikian juga dalam kopontren. Sistem penghargaan yang dikembangkan dalam Koperasi pondok pesantren berorientasi pada etika Islam, yaitu bersifat duniawi dan juga ukhrowi. Perilaku berkoperasi termasuk dalam amal dan ibadah. Dari perilaku berkoperasi yang baik, berarti untuk kehidupan di dunia dan sekaligus sebagai investasi untuk kehidupan di akhirat.